

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA**  
(Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Bejagung  
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2007)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh  
Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

Oleh:

**WAHYU NUR KHOMSYAH**  
**0410313122**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2008**

MOTTO

***Mengerjakan setiap hal dalam hidup  
harus dengan kesabaran dan kerja keras  
karena hidup adalah perjuangan***



**Berusaha dan berdoa adalah kunci sukses dalam hidup**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA (Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa  
Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun  
2007)

Disusun oleh : WAHYU NUR KHOMSYAH

NIM : 0410313122

Konsentrasi : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

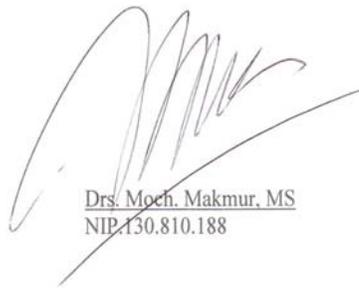
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Malang, Mei 2008

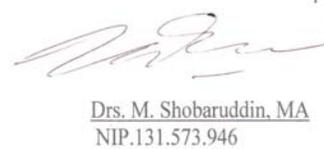
Mengetahui :

Dosen Pembimbing I



Drs. Moch. Makmur, MS  
NIP.130.810.188

Dosen Pembimbing II



Drs. M. Shobaruddin, MA  
NIP.131.573.946

TANDA PENGESAHAN

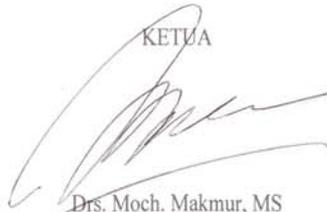
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Juli 2008  
Jam : 08.00 WIB  
Skripsi atas nama : WAHYU NUR KHOMSYAH  
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2007)

DAN DINYATAKAN LULUS

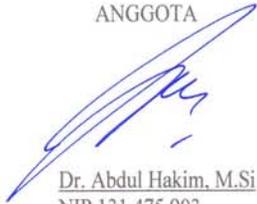
Majelis Penguji

KETUA



Drs. Moch. Makmur, MS  
NIP.130.810.188

ANGGOTA



Dr. Abdul Hakim, M.Si  
NIP.131.475.903

ANGGOTA



Wike, S. Sos. MSi  
NIP.132.302.464

#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, Juni 2008

Wahyu Nur Khomsvah  
NIM. 0410313122

## RINGKASAN

Wahyu Nur Khomsyah, 2008, **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA** (Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2007), Drs. Moch. Makmur, MS, Drs. M. Shobaruddin, MA. 75 Hal + x

Ujung tombak pembangunan nasional adalah pembangunan desa. Karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, maka hal yang sangat berpengaruh dan menentukan kelancaran proses pembangunan nasional tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia khususnya masyarakat Indonesia yaitu tergantung dari berhasil tidaknya pembangunan yang ada di desa. Oleh karena itu masalah utama yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan dalam pembangunan desa adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif yang didukung dengan teori tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Program Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dekomunitasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Analisa data melalui 4 (empat) tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa yang membahas tentang program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya uang dan dalam bentuk swadaya tenaga. Sedangkan partisipasi dalam evaluasi pembangunan ini diwujudkan masyarakat dengan ikut bertanggungjawab atas pekerjaan yang mereka lakukan dan mengetahui kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, dengan begitu pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan akan mengarah pada kesempurnaan. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa disebabkan karena hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi warga dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Besar kecilnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bejagung dipengaruhi oleh adanya kendala, yang meliputi: kepemimpinan, motivasi dan komunikasi.

Kepala Desa sebagai salah satu motivator masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa supaya lebih meningkatkan lagi dalam pemberian motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Selain itu masyarakat harus menyadari bahwa begitu pentingnya pembangunan, karena pembangunan yang selama ini dilaksanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.

## SUMMARY

Wahyu Nur Khomsyah, 2008, **SOCIETY PARTICIPATION IN RURAL DEVELOPMENT** (The Study of Development Activity Implementation in Bejagung Village, the district of Semanding, Tuban Regency in 2007), Drs. Moch. Makmur, MS, Drs. M. Shobaruddin, MA. 75 pages + x

District development is the front line of Nation Development. In Indonesia, most residents live in rural area, in that case rural district development is very important. The aim's is to improve quality of human resources in Indonesia, which can be measured by the succesfull of the development on rural district area. Therefore, the main problem that's have to face is, how the society's participation in rural district development.

The aim's of this research was to know society participation in rural district development. Beside that, it is also to know the obstacles that influencing society's participation in rural district development.

Method in this research to use approach qualitative descriptively which supported with theory local government, rural development program, society participation, and the important of society participation in rural district development. Data collecting through interview and documentation. Source of data obtained from primary data of clan data of sekunder. Data analysis through four phase that is: data collecting, data discount, presentation of data and verification.

Result of this research indicate that society participation in rural development includes society participation in planning, implementation, and rural development evaluation. Society participation in this development planning is implemented in 2 forms, they are society participation in money self support form and activity self support form. And participation in this development evaluation is implemented by society with responsible to the work that they do and knowing the lack that they should repair, so development implementation that has been done refer to perfect ness. The size of society participation in rural development is caused of implemented development result is useful for society and also can increase society welfare. Big and small in this society participation rate in Bejagung Village is influenced by an obstacle; it includes leadership, motivation, and communication.

The village head as one of the public motivator is expected to increase in giving motivation on the villages to give active participation on the village development. Beside that, the public must be aware of the importance of development, because the development that has been done is to full fill their need and their self interest.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**, Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Tahun 2007 sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staff.
- 3) Bapak Drs. Moch. Makmur, MS dan Bapak Drs. M. Shobaruddin, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu dan waktu kepada peneliti guna penyelesaian skripsi ini.
- 4) Seluruh Aparatur Pemerintah Desa Bejagung yang telah bersedia membantu dan memberi informasi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
- 5) Kedua orang tuaku dan adikku tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa.
- 6) Teman-teman semua terima kasih atas doa, dukungan, saran dan semangatnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 20 Juni 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pemerintahan Daerah .....	8
1. Desentralisasi .....	8
2. Otonomi Daerah .....	
a. Pengertian Otonomi Daerah .....	9
b. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah .....	11
c. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	11
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah .....	13
B. Pemerintahan Desa .....	
1. Pengertian Desa .....	14
2. Otonomi Desa .....	14
3. Pemerintahan Desa .....	16
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	17
C. Program Pembangunan Desa .....	
1. Pengertian Program .....	18
2. Pembangunan Desa .....	20
3. Perencanaan Pembangunan Desa .....	24
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	25
5. Penilaian atau Pengevaluasian Pembangunan Desa .....	26
D. Partisipasi Masyarakat .....	
1. Definisi Partisipasi .....	27
2. Bentuk dan Jenis Partisipasi .....	27
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	30

E. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Analisa Data	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	43
A. Penyajian Data	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Kondisi Geografis	43
b. Kondisi Demografis	44
2. Sosiokultur	44
3. Keadaan Aparat Pemerintahan Desa	50
B. Data Fokus Penelitian	
1. Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	51
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	53
b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	56
c. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan	61
2. Kendala-Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	63
C. Analisa Data	
1. Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	65
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	66
b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	67
c. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan	69
2. Kendala-Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	74

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Luas Wilayah Desa Bejagung Menurut Penggunaan Desa Bejagung Tahun 2007	43
2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Pada Desa Bejagung Tahun 2007	44
3.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Desa Bejagung Tahun 2007	45
4.	Prasarana Pendidikan Desa Bajagung Tahun 2007	46
5.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Desa Bejagung Tahun 2007	47
6.	Prasarana Ibadah Desa Bejagung Tahun 2007	47
7.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Pada Desa Bejagung Tahun 2007	48
8.	Pendapatan Desa Bejagung Tahun Anggaran 2007	49
9.	Daftar Jabatan dan Pendidikan Perangkat Desa Bejagung	51
10.	Jumlah Wakil Masyarakat Yang hadir Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007	54
11.	Hasil Rapat perencanaan kegiatan pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007	55
12.	Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Uang/Materi Dalam pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007	57
13.	Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga Dalam pembangunan Fisik Desa Bejagung Tahun 2007	58
14.	Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007	62

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam suatu negara yang meliputi berbagai segi kehidupan. Pemasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya komprehensif, dalam arti mencakup semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang melakukan berbagai upaya pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tentang tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Di Indonesia selama Orde Baru pelaksanaan program pembangunan terkesan sangat sentralistik dan tidak merata. Oleh karena itu, pada Era Reformasi sekarang ini dilahirkan sejumlah konsep pembangunan yang arahnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah sangat diperlukan agar pembangunan yang beerjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Selain alasan tersebut, karena beban pembangunan yang harus ditanggung oleh pemerintah sangatlah berat ditambah pula dengan kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan nasional tersebut, maka tidak mungkin pembangunan nasional hanya menggantungkan pada peran pemerintah saja, sehingga dipelukan adanya partisipasi aktif masyarakat baik secara individu maupun bagi mereka yang tergabung dalam sector privat.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional secara adil dan merata, pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan bertahap dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam GBHN 1999 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia

dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang demikian memerlukan adanya keselarasan dan kesetupaduan antar berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan adanya saling keterkaitan antara pembangunan yang satu dengan yang lain yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, hal ini memberikan arti bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan bersumber pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996, h. 4) adalah:

“Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong dari masyarakat”

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pembangunan di desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak di dalam proses pelaksanaannya tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya seluruh masyarakat desa.

Agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, (Tjokroamidjojo, 1995, h. 222) mengatakan ada 4 (empat) aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara tersebut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Tjokroamidjojo, 1995, h. 225) mengenai partisipasi adalah:

“Disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam system politik. Dilain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi”.

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan itu tidak berarti dan sudah pasti tidak akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan/partisipasi masyarakat adalah merupakan suatu usaha yang sia-sia saja karena tidak akan efektif sama sekali malah sebaliknya akan banyak menentukan hambatan yang sudah pasti tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus digali seoptimal mungkin, sehingga gerak pembangunan berjalan lancar kearah tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti yang dikemukakan oleh (Tjokroamidjojo, 1995, h. 222):

“Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara ”.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan meliputi sikap mental, tekad dan semangat masyarakat pada umumnya yang sangat penting. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan upaya-upaya mengembangkan kemampuan sumber daya manusia pada masyarakat desa.

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu sekali adanya partisipasi masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan dapat memberikan arti yang optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan suatu syarat dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat akan dihadapkan pada suatu permasalahan, apabila masyarakat itu sendiri tidak merasa berkepentingan dan memiliki terhadap program pembangunan di daerahnya, yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah dalam era dewasa ini dalam kenyataannya, apakah masih terdapat adanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Pada Desa Bejagung yang terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai swasta mempunyai tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang sudah cukup baik. Hal ini menjadi poin tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk swadaya uang. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, karena bagi masyarakat yang tidak mampu dapat berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Bentuk dan jenis partisipasi tersebut telah mampu membuat pembangunan di Desa Bejagung terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal. Hal tersebut terbukti bahwa dari data yang diperoleh peneliti dari 7 (tujuh) kegiatan pembangunan yang direncanakan di tahun 2007, setidaknya hampir 100% telah terlaksana dengan baik berkat partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk swadaya uang maupun swadaya tenaga.

Dengan latar belakang itulah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana dan sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa baik program yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Desa setempat. Dengan

pertimbangan asumsi tersebut, maka peneliti mengambil judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** ” (Studi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2007).

### **B. Rumusan Masalah**

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Sedangkan masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat kami susun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam pembangunan desa?
2. Apa kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dalam pembangunan desa
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

### **D. Kontribusi Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik terutama pengembangan ilmu Manajemen Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Ilmu Administrasi Publik, yang memberikan

sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sangatlah penting, mengingat bahwa sekarang ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek dalam pembangunan melainkan juga sebagai subyek dalam pembangunan.

- b. Sebagai salah satu bagian kajian ilmiah berupa sintesa pemikiran mengenai partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi desa untuk dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, juga sebagai masukan bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

### b. Bagi Masyarakat

(i) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam menunjang pembangunan di desanya.

(ii) Memberikan masukan kepada masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai wahana bagi peneliti sendiri dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

### 4. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti-peneliti terdahulu dan sebagai referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul dan topik yang sejenis.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Materi yang disajikan dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 5 bab, dimana setiap bab akan memuat pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi yaitu: Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Program Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisa dan interpretasi data yang didapat selama penelitian.

##### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang mungkin dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemerintahan Daerah

Di dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 1. Desentralisasi

Desentralisasi dari sudut asal-usul bahasa dari bahasa latin yaitu “de” atau lepas dan “centrum” atau pusat, sehingga desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Hal ini berarti bahwa adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat dengan tetap adanya hubungan pusat dengan bagian atau bawahannya (Supriatna, 1996, h.1).

Di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi merupakan cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam Pemerintahan Negara. Menurut J.H.A Logeman desentralisasi dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:

- a. Dekonsentrasi (*deconcentratie*) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan;
- b. Desentralisasi ketatanegaraan yang sering juga disebut desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing (Supriatna, 1996, h. 1).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pandang politik sebagai permainan kekuasaan (game teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik, pemyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerinyahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah atau desentralisasi adlah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. The Liang Gie dalam (Kaho, 2005, h. 8).

Sedangkan alasan dianutnya desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Demi tercapainya efektivitas pemerintahan;
- b. Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grassroots democracy*) Mariun dalam (Kaho, 2005, h. 10).

## 2. Otonomi Daerah

### a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau *autonomie* berasal dari bahasa Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti undang-undang, dengan kata lain otonomi adalah perundangan sendiri atau pemerintahan sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain pengertian-pengertian diatas, otonomi juga mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan lain;
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri, yaitu hak memerintah atau menentukan nasib sendiri;
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas suatu bangsa;
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil;
5. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangannya dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.
4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut segala urusan daerah menjadi kewenangan penyelenggara Pemerintah Daerah.

### **b. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Widjaja, 2002, h.23) tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Memberikan otonomi kepada daerah, khususnya Kabupaten/Kota ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan hakekat otonomi daerah adalah secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan lebih menitik beratkan tanggung jawab melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan fisik, ketentraman dan ketertiban umum.

### **c. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa selain prinsip otonomi seluas-luasnya juga diterapkan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

“ Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup

dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional”.

Prinsip yang sama tentang pelaksanaan otonomi daerah juga diungkapkan dalam Kansil dan Christine S.T. kansil (2004, h. 8) adalah prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, yakni dijelaskan sebagai berikut:

“ Prinsip otonomi yang nyata berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasar pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1. Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah bangsa;
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan;
3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah”.

Dari pernyataan diatas, bahwa prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri diluar urusan Pemerintah Pusat, selain itu prinsip yang digunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat tetapi tetap terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain prinsip tersebut, hal yang mendasar dari diberikannya otonomi kepada daerah adalah dengan tujuan agar daerah-daerah berorientasi pada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah boleh condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh

dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah**

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor dan syarat yang perlu mendapat perhatian. (Kaho, 2005, h. 60) beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksanaanya harus baik  
Faktor ini merupakan faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Mekanisme sistem pemerintahan, baik daerah maupun pusat akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkan baik pula.
2. Keuangan harus cukup dan baik  
Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena setiap kegiatan pemerintahan selalu membutuhkan biaya. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah karena pengendalian keuangan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan kemakmuran daerah tersebut dan anggaran yang merupakan alat utama pada pengendalian keuangan daerah harus tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang didasarkan pada pandangan kedepan yang lebih bijaksana.
3. Peralatannya harus cukup dan baik  
Peralatan yang baik (Praktis, efisien dan efektif) jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik, seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, transportasi dan sebagainya. Peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.
4. Organisasi dan Manajemennya harus baik  
Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Manajemen Pemerintahan Daerah yang baik tergantung pada kepala daerah dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

## **B. Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain sehingga hal ini mengakibatkan manusia selalu berinteraksi satu dengan yang lain dan kemudian terbentuklah suatu kelompok atau masyarakat yang didalamnya terdapat dinamika. Dari kelompok masyarakat tersebut kemudian muncul seorang yang lebih berkuasa yang biasa disebut sebagai pemimpin dimana dia adalah orang yang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk menjalankan aktivitas tertentu dalam usaha mencapai tujuannya. Kelompok masyarakat dalam jumlah yang besar dengan wilayah yang luas dan berdaulat disebut sebagai Negara. Dan didalam negara ada pemerintahan terendah yang disebut dengan desa.

Melalui perkembangan yang terus berlanjut, maka dibuatlah peraturan perundangan yang terus berubah sesuai perkembangan jaman dan sekarang ini telah dibuat peraturan perundangan-undangan yang baru yaitu Undang-undang No.32 tahun 2004 yang secara definitif menyebutkan: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Melalui definisi tersebut, Desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan disini dapat diartikan sebagai “ wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

### **2. Otonomi Desa**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Stuktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, Undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa. (Widjaja, 2003, h. 4-5)

Pada dasarnya prinsip utama otonomi desa adalah membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengatur dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Konsekuensi dari adanya otonomi desa, maka desa memiliki desentralisasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Desentralisasi politik: pembagian kewenangan dan tanggungjawab kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dasar seperti pembuatan KTP, (2) Desentralisasi pembangunan: devolusi perencanaan desa yang menegaskan desa berwenang membuat perencanaan sendiri (*village self planning*), (3) Desentralisasi fiskal: alokasi dana desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi politik dan desentralisasi pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa diikuti dengan adanya desentralisasi keuangan (fiskal) sampai ke desa yang didasari oleh asas perimbangan keuangan antara pusat, daerah dan desa (Eko, 2005, h. 47).

### 3. Pemerintahan Desa

Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus, perintah adalah pernyataan menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Istilah Pemerintah didalam UUD pertama-tama tercantum pada alinea keempat pembukaan, yaitu:

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka.....”.

Dengan pernyataan tersebut dapat ditarik suatu garis sehingga timbul dua pihak : *Pemerintah* dan *yang diperintah*. *Pemerintah* berfungsi sebagai kepala dalam pencapaian tujuan nasional. Sedangkan *yang diperintah* disini mewakili rakyat Indonesia. Ada beberapa sebab-sebab yang menjadikan pemerintah berhubungan dengan yang diperintah. Sebab-sebab itu antara lain:

1. Sebab Organik. Hubungan timbul karena justru karena sesungguhnya *Pemerintah* itu berasal dari dan merupakan bagian integral dari rakyat.
2. Sebab Fungsional. Hubungan timbul karena fungsi *Pemerintah* terhadap *yang diperintah* dan sebaliknya mengharuskan adanya

hubungan timbale balik diantara keduanya. Tanpa yang diperintah, Pemerintah tidak ada artinya, demikian juga sebaliknya.

3. Sebab Ideal. Keduanya disatukan oleh tujuan yang sama.

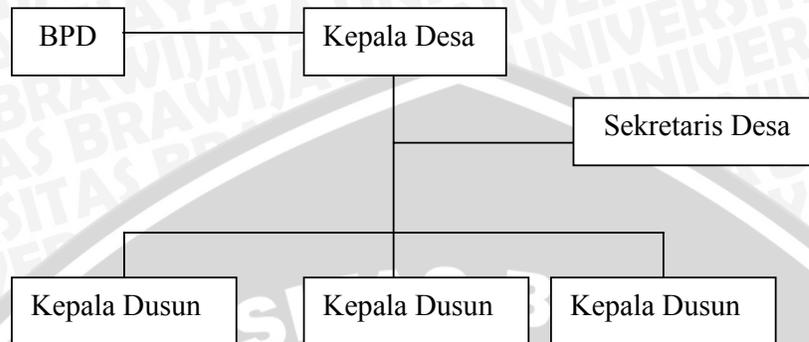
Dari paparan diatas, maka dapat diambil pemahaman bahwa Pemerintahan Desa adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional dari suatu Negara, yang menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau institusi tertentu yang terlegitimasi untuk melakukan pemenuhan atau pelayanan terhadap apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa.

**4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan Pemerintahan Desa tidak lagi diatur dengan Undang-undang tersendiri tetapi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, Pemerintahan Desa merupakan bagian integral dari pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan lebih lanjut.

Dalam Pemerintahan Desa, susunan pemerintahannya terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Sedangkan BPD yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang menunjukkan bahwa kedudukan BPD adalah sejajar dengan kader dengan garis penghubung yang menunjukkan garis koordinasi, adalah sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**



Sumber: Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Sedangkan badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada Bupati agar Kepala Desa diberhentikan.

Hubungan antara Badan Perwakilan Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa, dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan desa. Jika salah satu dari Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa juga termasuk Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya.

### **C. Program Pembangunan Desa**

#### **1. Pengertian Program**

Program adalah merupakan suatu rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Program juga merupakan rancangan dasar

dari suatu kelompok atau organisasi yang akan dilaksanakan dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana biasanya suatu program berhubungan erat dengan proyek sebagai tindakan operasionalnya.

Program bersifat inovatif dan multifungsi, sehingga dengan suatu program diharapkan berbagai masalah yang berhubungan dengan pembangunan dan kemasyarakatan dapat dipecahkan. Dengan konsekwensi apabila banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maka dibutuhkan banyaknya program lain atau program cadangan untuk pelaksanaan program pembanguann berikutnya agar tidak terjadi kemacetan.

Ciri-ciri program yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu meliputi :

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dari keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut

Berkaitan dengan judul penelitian ini maka program-program pembangunan dilaksanakan di desa selain dengan modal atau sumber dana sendiri atau yang biasanya dilaksanakan atas partisipasi dan swadaya masyarakat, juga dilaksanakan berdasarkan program bantuan dari pemerintah. Program-program pembangunan yang dilakukan di desa yang berupa bantuan atau program dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Instruksi Presiden, yaitu merupakan program pembangunan yang diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Surat Keputusan atau Instruksi Presiden.
2. Bantuan Khusus Presiden, yaitu bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa secara khusus oleh Presiden.
3. Bantuan program pembangunan dari Instansi atau Departemen lainnya.

4. Bantuan program dari Pemerintah Daerah baik dari Kabupaten/Kota maupun dari Propinsi.
5. Bantuan lainnya yang sah.

## 2. Pembangunan Desa

Setiap usaha atau kegiatan manusia yang menuju kepada kemajuan atau perubahan yang lebih baik dari keadaan semula disebut pembangunan. Dengan demikian pembangunan adalah suatu usaha atau kegiatan manusia yang dilaksanakan secara terus-menerus, bertahap menuju kemajuan atau keadaan yang lebih baik dan meningkat dari keadaan semula.

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Dari pengertian diatas dapat diambil beberapa komponen arti pembangunan yaitu :

- a. Pertumbuhan yang direncanakan.
- b. Rencana tersebut harus dilaksanakan secara sadar dan rasional oleh Bangsa, Negara dan Pemerintah.
- c. Pembangunan adalah proses yang diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Pembangunan dilaksanakan menuju modernitas, yaitu memberikan arah hidup yang baru dan lebih baik dari keadaan semula.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pembangunan itu suatu usaha yang diselenggarakan secara sadar, guna menciptakan perubahan-perubahan dan sekaligus mewujudkan tujuan Negara yaitu mencapai suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Lebih lanjut pengertian mengenai desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat pengaturan tentang desa pada Bab XI pasal 200 sampai dengan pasal 216. pada penjelasan umum tentang desa disebutkan sebagai berikut:

“Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Dari konsep pembangunan dan desa diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan proses pembangunan yang dilaksanakan di desa secara terpadu. Sedangkan pengertian pembangunan desa sendiri adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerinath dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap pembanguan yang diinginkan.

Beberapa rumusan ciri-ciri khas pembangunan desa, adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat desa berarti membangun manusia tradisional menjadi manusia modern, yaitu manusia yang antara lain :
  - a. Bersedia mengalami hal-hal baru.
  - b. Terbukti bagi perubahan-perubahan.
  - c. Mampu membentuk, memiliki dan mengajukan pendapat sendiri.
  - d. Demokratis dalam menanggapi pendapat orang lain.
  - e. Berorientasi pada masa kini dan masa depan, tidak pada masa lalu.
  - f. Mampu melaksanakan perencanaan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
  - g. Tidak menyerah pada nasib.Untuk mengenalkan hal-hal baru pada masyarakat diperlukan komunikasi pembangunan.
2. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek yang bersangkutan, pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
3. Metode pendekatan pembangunan desa adalah metode yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi psikologi, social dan ekonomi dari setiap lingkungan kebudayaan dimana desa yang bersangkutan berada.
4. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membentuk anggota masyarakat untuk memperoleh sikap, keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif.

5. Pembangunan masyarakat bermaksud membentuk rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.
6. Pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan mengintensifikan partisipasi masyarakat, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri.
7. Pembangunan pedesaan berarti membangun usaha tani atau membangun pertanian.
8. Membagi pedesaan berarti membangun prasarana.

Pembangunan desa memiliki ruang lingkup pelaksanaan di pedesaan, maka dapat ditegaskan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat desa, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan dan menciptakan hubungan selaras masyarakat dan lingkungannya. Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki desa.

Selanjutnya pengertian fisik dalam pembangunan desa dapat diartikan “Jasmani, badan, misalkan kekuatan”. Dan juga dapat berupa bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan fisik desa adalah usaha atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa bersama pemerintah untuk mewujudkan prasarana-prasarana dan sarana fisik desa.

Program pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan pola dasar dan pola operasional pembangunan masyarakat desa, dimana pokok-pokok kebijaksanaan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip integritas
  - a. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka kesatuan tindak dan gerak dengan program nasional sehingga dalam pelaksanaannya harus saling menunjang.
  - b. Prinsip ini harus berlaku baik vertikal maupun horizontal dalam batas nasional maupun regional.

- c. Prinsip ini berlaku untuk semua aparat pelaksanaan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
  - d. Program pelaksanaannya terkandung landasan, sarana, kegiatan dan target yang menunjukkan kesatuan arah tahap-tahap yang telah ditentukan.
2. Prinsip keseimbangan
- a. Pembangunan desa harus dapat menciptakan dasar-dasar perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional itu harus ada keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dengan sektor lainnya.
  - b. Harus ada keseimbangan antar perkembangan desa dan kota, dimana kota sebagai pusat fasilitas dan desa sebagai sumber-sumber tenaga dan bahan mentah.
  - c. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat.
  - d. Pembaharuan yang tidak menimbulkan disintegrasi sosial yang membawa efek negatif.
  - e. Keseimbangan yang proporsional antara pengembangan ekonomi, sosial, budaya politik, ketertiban dan keamanan.
  - f. Keseimbangan tanggung jawab dan inisiatif antara pemerintah dan masyarakat.
3. Prinsip prioritas
- Mengingat terbatasnya kemampuan dari segi biaya maupun keahlian, maka perlu dilaksanakan proyek-proyek yang strategis seperti :
- a. Bidang ekonomi sebagai alat yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pengembangan desa-desa yang mempunyai potensi dan kemungkinan yang paling baik.
4. Prinsip keberlangsungan
- a. Sasaran jangka pendek dilanjutkan dengan sasaran jangka panjang.
  - b. Setiap desa yang telah mencapai perkembangan harus dibina untuk berkembang terus agar tidak mundur dan statis.

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memupuk rasa tanggung jawab masyarakat dalam memelihara, membina dan melanjutkan pengembangan yang telah dicapai.
  - d. Melatih dan mendidik kader-kader dengan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembangunan desa.
5. Prinsip swadaya masyarakat
- a. Merupakan dasar dan bantuan pemerintah untuk mendorong bagi pelaksanaan pembangunan desa.
  - b. Potensi swadaya masyarakat perlu ditingkatkan demi keberlangsungan pembangunan masyarakat desa serta dapat memupuk kerjasama yang baik dan bergotong royong untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan.

### 3. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan segala sesuatu agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka haruslah dibuat suatu perencanaan yang matang dan terstruktur. Demikian halnya didalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa haruslah dibuat terlebih dahulu suatu perencanaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan suatu proses, perbuatan, cara merencanakan, atau merancang sesuatu agar dicapai hasil yang efisien dan efektif. Sedangkan rencana pembangunan desa adalah hasil daripada kegiatan perencanaan, sifatnya menyeluruh karena perencanaan itu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah desa yang demikian kompleks.

Didalam perencanaan pembangunan desa alangkah baiknya jika memanfaatkan serta memadukan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dimana pengelolaannya harus seimbang. Apabila didalam pengelolaannya ataupun pemanfaatannya kurang seimbang maka akan mengakibatkan ketimpangan atau ketidakseimbangan yang akhirnya berakibat pada kurang lancarnya proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan memperhatikan rencana pembangunan desa diatas, maka perlu dipertimbangkan juga mengenai faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang dapat

mempengaruhi proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Penetapan jenis-jenis program kegiatan dan proyek-proyek pembangunan pedesaan.
- b) Penetapan strategi kebijaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.
- c) Bidang perencanaan.
- d) Bidang penyediaan dana.
- e) Bidang pelaksanaan atau operasional pembangunan pedesaan.
- f) Bidang pengawasan pembangunan pedesaan.
- g) Bidang evaluasi (Saparin, 1986, h. 205).

Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan desa selain membuat perencanaan yang matang dan terstruktur juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan perencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan pembangunan desa yang lancar dan sesuai dengan keinginan bersama terutama keinginan masyarakat luas sehingga mereka merasa puas dengan hasil pembangunan yang ada.

#### **4. Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Setelah dibuat suatu perencanaan pembangunan desa yang matang, maka tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Sebelum kita menginjak lebih jauh mengenai bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, terlebih dahulu kita mengetahui tentang arti daripada pelaksanaan itu sendiri. Pelaksanaan adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ini diharapkan kepada semua pihak baik para aparat Pemerintah Desa maupun masyarakat untuk aktif dalam menjalankan segala aktivitas khususnya dalam rangka pembangunan desa guna mencapai kesejahteraan bersama. Selain peran aktif dari semua pihak, sumber daya alam, sumber daya manusia dan tidak kalah penting sumber dana juga harus diperhatikan untuk menunjang proses pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa ini hanya dapat berhasil jika terdapat :

- a) Memperhatikan rencana yang baik, masuk akal dan direalisasikan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- b) Tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya.
- c) Adanya organisasi yang mampu mewujudkan rencana menjadi hasil

Untuk itu agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan swadaya, partisipasi serta gotong royong masyarakat desa yang bersangkutan.

##### **5. Penilaian atau Pengevaluasian Pembangunan Desa**

Penilaian atau pengevaluasian adalah merupakan suatu proses menilai, memberikan penilaian. Tujuan daripada pengevaluasian ini adalah agar sedini mungkin pelaksanaan program pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan sasaran atau tujuan pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengevaluasian ini adalah merupakan kelanjutan tindakan dari pelaksanaan pembangunan. Pengevaluasian ini juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan suatu program pembangunan desa. Oleh karena itu perlu ditetapkannya suatu standar atau criteria mengenai indikator-indikator apa saja yang dapat diukur sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dapat diukur dari aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dapat ditumbuhkan atau ditingkatkan, dan jika
- 3) Prasarana fisik dan
- 4) Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan memperhatikan kriteria-kriteria diatas diharapkan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Serta diharapkan juga evaluasi yang dilakukan akan dapat menghindarkan atau meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil yang didapat merupakan hasil pembangunan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat pelayanan publik dapat merasakan kepuasan.

## D. Partisipasi Masyarakat

### 1. Definisi Partisipasi

Secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu “*participare*” yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Pengertian partisipasi menurut (Sastropoetro, 1986, h. 39) bahwa: “partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan menurut Alastraire White dalam (Sastropoetro, 1986, h. 52) partisipasi diartikan sebagai “keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan/pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan”.

Dalam hubungannya dengan pembangunan, PBB memberi definisi sebagai berikut:

- a. Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut
- b. Dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan yang telah ditentukan secara sukarela
- c. Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari program/proyek tersebut.

### 2. Bentuk dan Jenis Partisipasi

Menurut pendapat Keith Davis sebagaimana yang dikutip (Sastropoetro, 1988, h. 16) mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

Bentuk partisipasi:

1. Konsultasi biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komunitati (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain desa yang menentukan anggarannya)

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
6. Aksi massa
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri
8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom

Jenis-Jenis Partisipasi:

1. Pikiran (*psychological participation*)
2. Tenaga (*physical participation*)
3. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*)
4. Keahlian (*participation with skill*)
5. Barang (*material participation*)
6. Uang (*money participation*)

Sedangkan menurut (Ndraha, 1982, h. 27) bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi
- b. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun yang bermaksud mengiyakan atau menerima dengan syarat
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menilai pembangunan

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka penulis membatasi jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam mengemukakan pendapat dan pikiran  
Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan pikiran dalam hubungannya dengan pembangunan desa diwujudkan dalam keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan yang berupa pendapat dan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan di desanya. Sumbangan pendapat atau pikiran ini dapat disalurkan melalui rapat atau musyawarah yang membahas tentang pembangunan desa. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang besar, maka hendaknya semua masyarakat dilibatkan dalam

musyawarah pembahasan tentang pembangunan, sehingga seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat dapat ditampung dan dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga nantinya program-program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dan menyentuh kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

## 2. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan desa, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan didesanya dengan menyumbangkan tenaga mereka, partisipasi tenaga kerja yang ada di desa di dasari dengan semangat gotong-royong yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Untuk melestarikan semangat kerja seperti ini, maka sifat dan semangat gotong-royong harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

## 3. Partisipasi dalam bentuk *skill* atau keahlian

Partisipasi dalam bentuk skill atau keahlian ini diwujudkan dengan memberikan sumbangan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat desa hubungannya dengan pembangunan desa. Masyarakat yang memiliki kemampuan pada bidang tertentu dapat menyumbangkan keahliannya dalam kegiatan pembangunan didesanya, seperti misalnya masyarakat memiliki kemampuan di bidang pertukangan. Sumbangan kemampuan mereka ini sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, dengan dibantu oleh masyarakat yang lain.

## 4. Partisipasi dalam bentuk sumbangan

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk materi yang merupakan sumbangan dari semua masyarakat desa. Sebagai contoh, misalnya di suatu desa akan dilaksanakan pembangunan fisik, misalkan saja pembuatan jalan, maka masyarakat dapat memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka, sumbangan seperti ini dapat berupa sumbangan uang, sumbangan bahan bangunan, sumbangan makanan,

dan lain-lain. Sumbangan yang dimaksud disini bersifat sukarela tidak memaksa, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Seluruh masyarakat desa harus dilibatkan keikutsertaannya dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan didesanya, tanpa kecuali. Pembangunan disini mencakup pembangunan fisik yang ada di desa. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di desa.

6. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan

Dalam partisipasi ini masyarakat diberikan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan, namun hendaknya didalam memberikan penilaian disertai dengan pendapat mereka untuk masukan perencanaan pembangunan berikutnya.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Menurut (Sastropetro, 1986, h.76) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan di desanya, antara lain:

1. Sistem nilai budaya masyarakat desa

Menurut pendapat (Sastropetro, 1986, h. 76): “keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa dikemukakan adanya sistem dan nilai budaya untuk saling tolong menolong diantara sesama masyarakat yang demikian melekat di hati masyarakat desa yaitu apa yang lebih dikenal dengan gotong-royong”. Sistem nilai ini pada awalnya masih berada dalam lingkup keluarga dalam aspek tertentu saja, misalnya dalam membuka kebun atau lading baru, membangun rumah baru, membuka jalan baru yang merupakan sisi aktivitas pembangunan masyarakat desa disamping urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah keadaan seperti

pengangkatan kepala desa, perkawinan, kematian, kelahiran, dan sebagainya. Nilai-nilai budaya yang melekat ini terus terbawa di era pembangunan sekarang ini dan wujud gotong-royong diarahkan ke segi-segi positif terutama dalam berbagai aspek dalam pembangunan fisik. Sistem nilai budaya yang positif ini untuk terus dipelihara serta ditingkatkan guna menggalakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

## 2. Pendidikan

Tingkat partisipasi masyarakat juga akan dipengaruhi tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat desa. Menurut (Sastropetro, 1986, h. 76): “makin baik tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat desa akan semakin baik dalam memahami berbagai program atau perencanaan pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah di daerah”. Dengan kemudahan pemahaman terhadap berbagai program pemerintah tersebut, maka partisipasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan tersebut akan dapat bervariasi dan tidak hanya partisipasi tenaga saja.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka factor pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan. Kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa memang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diperoleh, oleh karena untuk menangani pembangunan dibutuhkan manusia-manusia yang cerdas, terdidik, terampil dan mempunyai semangat dan keuletan yang tangguh untuk menghadapi setiap tantangan pembangunan didesanya.

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, maka perhatian terhadap upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat pedesaan adalah sangat diperlukan, minimal rakyat pedesaan dapat bebas dari buta huruf dan buta aksara yang saat ini sudah mulai diberantas melalui program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

## 3. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan juga merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa. Menurut pendapat (Sastropetro, 1986, h. 76) adalah: “Model kepemimpinan yang

digunakan oleh seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa". Model kepemimpinan yang dimaksud dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

a. Tipe pemimpin yang otokratis

Tipe ini dalam pelaksanaannya cenderung bertindak sesuai dengan kehendak dari seorang pemimpin, seorang pemimpin menganggap organisasi milik pribadi, sehingga mengidentikkan tujuan yang ingin dicapai dengan tujuan organisasi. Dalam tipe kepemimpinan ini bawahan dianggap sebagai alat dari seorang pemimpin dalam usaha mencapai tujuan, masyarakat/pihak yang dipimpin tidak diberikan kesempatan untuk memberikan partisipasi pendapat/pikiran karena pemimpin hanya mau menjalankan apa yang dikehendaknya tanpa banyak memperhatikan suara atau pendapat yang dipimpinnya. Keterlibatan masyarakat dalam kaitan dengan pola kepemimpinan ini cenderung dilator belakangi oleh adanya paksaan dari sang pemimpin dan bukannya datang dari inisiatif/kehendak masyarakat.

b. Tipe pemimpin yang militeristis

Tipe ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan otokratis, diman hubungan antara seorang pemimpin dan yang dipimpin lebih banyak bersikap perintah. Dengan tipe kepemimpinan seperti ini inisiatif partisipasi dari bawahan bersifat pasif dan menunggu komando saja. Di dalam menggerakkan bawahannya, seorang pemimpin dalam tipe kepemimpinan ini, selalu bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Sama seperti dengan tipe pemimpin otokratis, dalam tipe kepemimpinan ini juga sulit untuk menerima kritikan dari bawahannya. Semua perintah berasal daripemimpin, dan seorang bawahan hanya sebatas melaksanakan perintah tersebut dengan disiplin yang tinggi , sehingga saran dan pendapat dari bawahannya tidak diperlukan.

c. Tipe pemimpin yang demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis di dalam menggerakkan bawahannya selalu bertitik tolak dari pendapat manusia adlah makhluk yang termulia di

dunia, sehingga perlu adanya usaha untuk menghargai dan menghormati hak dan kebebasan dari bawahannya untuk berpendapat dan menyumbangkan partisipasinya terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Didalam usaha untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama, selalu mengutamakan kerjasama dan tim kerja, baik antara atasan dan bawahan maupun antara bawahan dan bawahan. Didalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua bawahannya untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya demi kesuksesan bawahan

d. Tipe pemimpin yang paternalistik

Dalam tipe kepemimpinan ini, semua bawahan selalu dianggap sebagai manusia yang tidak dewasa, sehingga selalu bersikap terlalu melindungi, selalu mengatur dalam setiap tugas yang diperintahkannya, tanpa memberi kesempatan kepada bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan saran, pendapat atau pikiran untuk mengambil keputusan. Inisiatif selalu datang dari pemimpin, tanpa memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif, daya kreasi dan fantasinya. Seorang pemimpin dalam tipe ini selalu merasa bahwa dirinya yang selalu benar, merasa dirinya lebih pintar dan mengerti daripada bawahannya.

e. Tipe pemimpin yang kharismatik

Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin dihormati dan disegani bukan karena jabatan formal atau kekuasaan yang dimilikinya, tetapi cenderung pada charisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang mempunyai charisma mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa masih menjadi pengikut pemimpin itu.

Untuk menumbuhkan dan menyuburkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka masalah kepemimpinan merupakan yang penting. Penerapan pola kepemimpinan yang tepat akan mempengaruhi pula partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desanya. Karena itu menjabat

sebagai pemimpin di desa adalah sangat tepat kalau dipilih oleh rakyat sendiri, dengan sistem demikian, hasilnya akan selaras dengan inspirasi dan kehendak masyarakat itu sendiri yang menghendaki hak dan suara rakyat dalam setiap kegiatan dan rencana pembangunan di desa. Makin demokratis seorang pemimpin akan semakin besar pula kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desanya.

#### 4. Komunikasi

Faktor ini merupakan salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, karena gagasan-gagasan kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan kemudian dimengerti oleh masyarakat desa, karena hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan masyarakat dan inspirasi masyarakat.

Komunikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak. Fungsi utama dari komunikasi pembangunan adalah memberikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, informasi yang dimaksud dapat beraneka ragam dan bermacam-macam tergantung dari kehendak sumber informasi untuk memberikan pesan kepada penerima informasi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, maka masyarakat desa merupakan pihak penerima informasi, sedangkan pemerintah merupakan pemberi informasi. Pemerintah sebagai pemberi informasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat harus dapat dipahami oleh masyarakat secara mengena terutama pesan-pesan pembangunan sehingga masyarakat akan tergugah untuk berpartisipasi diseluruh kegiatan pembangunan yang tengah berlangsung.

#### **E. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, perencanaan terperinci dan kegiatan-kegiatan yang nyata dan efektif, tetapi juga hendaknya

dapat menimbulkan respon dari masyarakat dan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

(Mulyarto, 1987, h. 48) mengemukakan arti penting partisipasi dalam pembangunan, yaitu:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
- d. Pembangunan dilakukan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan
- f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
- g. Partisipasi menopang pembangunan
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif, baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- j. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak dan demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Lebih lanjut Diana Conyers sebagaimana dikutip oleh (Supriatna, 2000,h. 14) mengemukakan bahwa ada tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting, karena:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek yang gagal.

- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa biasanya memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari pembangunan itu sendiri, atau dapat dikatakan menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat ikut mempengaruhi arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme dan proses politik yang berlangsung dalam suatu negara. Disamping itu masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan nyata sesuai dengan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang ditentukan dalam proses politik dan sistem serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.



### BAB III METODE PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dalam mendukung penulisan ini. Untuk memecahkan masalah dengan baik, maka perlu terlebih dahulu menentukan langkah-langkah dalam metode penelitian yang dipergunakan. Pada dasarnya metode diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan pedoman atau cara yang dilakukan suatu penelitian agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan dua alasan penting oleh peneliti. Pertama, bahwa jenis penelitian ini dipandang mampu untuk menggambarkan secara cermat fenomena social tertentu yang telah terjadi atau sedang terjadi, dengan cara mengembangkan beberapa konsep dan menghimpun fakta, kemudian secara analitis diberi gambaran, penguraian, penjelasan, penafsiran serta penyimpulan. Fenomena yang akan dideskripsikan dan dianalisis melalui penelitian ini mengacu pada fenomena “apa yang terjadi” (deskriptif), dan “bagaimana terjadinya” (analitis) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung. Sedangkan alasan yang kedua adalah bahwa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengungkap dan memahami apa saja yang terjadi dibalik fenomena yang sedikit belum diketahui di lapangan serta penelitian kualitatif dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari penelitian ini.

Lebih lanjut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh (Moleong, 2006, h.4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dikatakan olehnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini, lebih mengandalkan unsur manusia (peneliti) sebagai instrument utama, dan berinteraksi dengan orang yang diamati dalam suatu cakupan yaitu pada kantor Desa Bejagung serta tempat-tempat yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini guna menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang seperti observasi dan dokumentasi.

### **B. Fokus Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai fokus penelitian, sebagaimana yang ditulis oleh Moleong (2006, h.237) bahwa fokus penelitian memiliki 2 maksud penelitian, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang dibahas oleh peneliti
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi - eksklusif ( memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus seorang peneliti tahu persis data / informasi apa yang akan dikumpulkan dan mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Sejalan dengan perumusan masalah, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yaitu:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
  - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
  - c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa
2. Kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Desa Bejagung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk mengetahui Besar kecilnya partisipasi masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung, dan juga lokasi penelitian ini berada pada daerah tempat tinggal peneliti, sehingga persyaratan penelitian kualitatif ini dimungkinkan optimal dalam pelaksanaan wawancara atau kegiatan sejenisnya. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian tersebut diharapkan agar peneliti lebih mudah dalam memperoleh ijin penelitian, mudah dalam memperoleh data dan informasi serta efisiensi dalam hal dana dan waktu.

Sedangkan situs penelitian disini adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti. Dengan demikian, yang menjadi situs penelitian disini adalah:

1. Kantor Desa Bejagung
2. Ruang kerja perangkat Desa Bejagung
3. Tempat-tempat lain, dimana peneliti dapat menemukan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2002, h. 107) yang dimaksud dengan sumber data adalah merupakan subyek bagi peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan dan relevan dengan tema penelitian. Berkaitan dengan hal ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

##### a. Hasil wawancara dengan:

1. Kepala Desa Bejagung : Bapak Edi Yusanto
2. Perangkat Desa Bejagung

### 3. Masyarakat

#### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya dari dokumen, arsip, perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder ini, disebut juga sebagai data byang telah tersedia. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah:

- a. Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007
- b. Laporan hasil pembangunan Desa Bejagung tahun 2007
- c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejagung tahun 2007

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data (Arikunto, 2002, h.126) Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Wawancara ini dilakukan terkait dengan fokus penelitian. Wawancara (*interview*) atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002, h. 132). Wawancara ini dilaksanakan oleh peneliti dengan melibatkan beberapa aparat Pemerintah Desa yang ada di kantor balai Desa Bejagung antara lain Kepala Desa Bejagung, Sekretaris Desa Bejagung, beberapa perangkat Desa Bejagung dan masyarakat Desa Bejagung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sudah tersedia pada lokasi dan situs penelitian. Bahan-bahan ini dapat berupa arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Bejagung tahun 2007.

**F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana/benda (Arikunto, 2002, h. 126). Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara, hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data yang diperlukan guna kegiatan penelitian.
3. Catatan lapangan, merupakan buku catatan dan alat tulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

**G. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini dikarenakan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisa, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat di Desa Bejagung dalam pembangunan desa dan kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung, dengan memberikan penjelasan dan pemaparan selengkap

mungkin, yang mana informasinya diperoleh melalui wawancara di lapangan. Menurut Miles dan Huberman (1992, h. 15-17), analisa data terdiri dari alur kegiatan yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

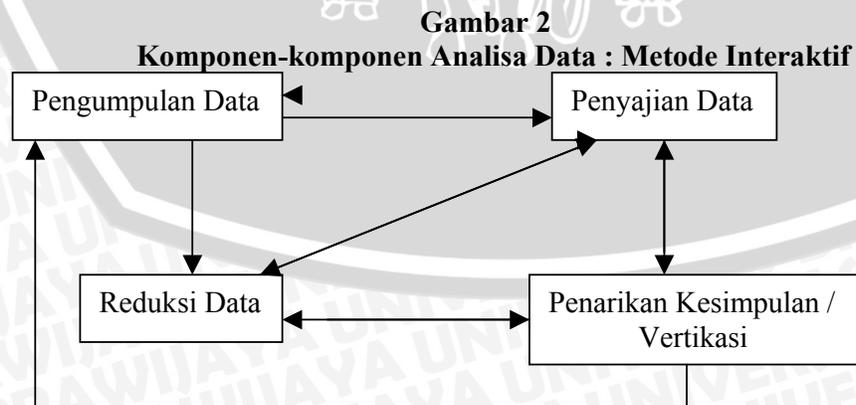
Reduksi data yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar. Jika digambarkan dalam bagan, maka komponen-komponen tersebut akan terlihat sebagai berikut :



Sumber : Miles dan Huberman penerjemah Tjetjep (1992, h. 16-19)

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

Dalam bab hasil dan pembahasan ini, penyajian data lebih mendeskripsikan mengenai lokasi dan situs penelitian yang dilakukan. Penyajian data tersebut terdiri dari:

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a). Kondisi Geografis

Desa Bejagung termasuk dalam wilayah Kecamatan Semanding yang terletak sekitar 2 km di sebelah selatan Kabupaten Tuban. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding
- 2) Sebelah timur : Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding
- 3) Sebelah selatan : Desa Semanding, Kecamatan Semanding
- 4) Sebelah barat : Desa Karang, Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding

Luas wilayah Desa Bejagung adalah 161,75 Ha, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Desa Bejagung Menurut Penggunaan**  
**Pada Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Pemukiman umum	75 Ha	46,37
2.	Sawah irigasi	3 Ha	1,85
3.	Ladang/tegalan	73,87 Ha	45,67
4.	Bangunan	0,79 Ha	0,49
5.	Rekreasi dan olahraga	2,5 Ha	1,55
6.	Lain-lain	6,59 Ha	4,07

Sumber : Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Secara geografis, Desa Bejagung merupakan daerah dataran rendah yang terletak pada ketinggian 296 m. Dimana 75 Ha diantaranya untuk pemukiman umum, lahan pertanian sawah irigasi teknis seluas 3 Ha, selain itu seluas 0,79 Ha untuk bangunan dan sisanya untuk prasarana umum. Dilihat dari luas

pemanfaatan lahan, ternyata pemukiman umum lebih mendominasi wilayah Desa Bejagung ini.

### b). Kondisi Demografis

Desa Bejagung untuk periode tahun 2007 memiliki jumlah penduduk sebanyak 4341 jiwa atau 1208 KK, antara lain meliputi:

- 1) Laki-laki : 2089 jiwa atau 48 %
- 2) Perempuan : 2252 jiwa atau 52 %

Berdasarkan komposisi diatas, maka terlihat bahwa penduduk perempuan 4 % lebih banyak dari keseluruhan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk Desa Bejagung menurut kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Pada Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1.	0 – 3	211	4,86
2.	4 – 6	263	6,06
3.	7 – 12	590	13,59
4.	13 – 15	282	6,5
5.	16 – 19	266	6,13
6.	20 – 26	415	9,56
7.	27 – 40	796	18,33
8.	41 – 50	560	12,90
9.	51 – 58	409	9,42
10.	58 keatas	549	12,65
	Jumlah	4341	100

Sumber : Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa Desa Bejagung memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada usia nonproduktif, sehingga perbandingan lebih banyak penduduk yang berusia produktif.

## 2. Sosial Budaya

### a. Adat istiadat

Tata cara kehidupan masyarakat Desa Bejagung masih terikat pada tradisi yang secara turun temurun dianut. Ini dapat ditemukan dalam pergaulan hidup

sehari-hari yang masih menunjukkan ciri-ciri kehidupan masa lalu seperti gotong-royong, semangat kekeluargaan, serta pengaruh tokoh masyarakat yang masih kuat. Ciri-ciri kehidupan ini semakin tampak dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, pembangunan tempat ibadah, kematian dan kegiatan sosial lainnya.

#### b. Pendidikan

Perkembangan social budaya pada dasarnya dapat dilihat dari sisi pendidikan, karena pendidikan merupakan unsur yang tepat dalam menuju kemajuan mutu atau kualitas SDM dimasa mendatang. Pendidikan itu sendiri dapat berbentuk pendidikan formal berjenjang dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komposisi penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Pada Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak tamat SD	31	1
2.	SD/ sederajat	851	27,48
3.	SLTP/ sederajat	156	5,04
4.	SLTA/ sederajat	1906	61,54
5.	D-3	25	0,81
6.	S-1	125	4,04
7.	S-2	3	0,09
	Jumlah	3097	100

Sumber : Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Data perbandingan diatas menunjukkan bahwa jumlah terbesar tingkat pendidikan masyarakat Desa Bejagung adalah pada tingkat SLTA/ sederajat yaitu 1908 orang atau 61,54 %. Sedangkan pada urutan kedua yaitu pada tingkat SD/ sederajat sebanyak 851 orang atau 27,48 %. Jumlah penduduk tingkat pendidikan SLTP/ sederajat sebesar 156 orang atau 5,04 %, urutan keempat yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan S-1 sebesar 125 orang atau 4,04 % dari total keseluruhan penduduk yang mengenyam bangku sekolah. Penduduk yang tidak tamat SD sebesar 31 orang atau 1 %, penduduk dengan tingkat pendidikan D-3 yakni sebesar 25 orang atau 0,81 %, dengan pendidikan akhir S-2 sebesar 3 orang atau 0,09%. Hal tersebut menandakan

bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Bejagung menunjukkan suatu hak yang menggembirakan, hal ini dibuktikan dengan adanya minat penduduk dalam mengenyam pendidikan yang dapat dikatakan tinggi.

Setiap Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan berusaha memberantas buta huruf. Salah satu usaha Pemerintah Desa yang berusaha memberantas buta huruf bagi masyarakat dilakukan dengan kerja keras dan partisipasi dari semua pihak termasuk kalangan swasta. Untuk itu disajikan table yang menunjukkan distribusi tempat atau prasarana pendidikan pada Desa Bejagung sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Prasarana pendidikan Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Jenis prasarana	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	2
2.	SD Sederajat	2
3.	SLTP Sederajat	1
4.	SLTA Sederajat	2
5.	Universitas	-

Sumber: Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sekolah yang ada di Desa Bejagung sebanyak 7 (tujuh) yang terdiri dari 2 (dua) sekolah Taman Kanak-kanak, 2 (dua) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

#### c. Agama

Kebebasan memilih dan memeluk agama merupakan hak asasi warga Negara Indonesia, namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, setiap warga Negara diharuskan untuk menganut salah satu agama dan kepercayaan yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Di Desa Bejagung kehidupan beragama diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana ketenangan dan keselarasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Perbedaan bukanlah suatu halangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjalankan pembangunan.

Berikut ini akan ditunjukkan table yang memuat jumlah penduduk menurut agama pada Desa Bejagung:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2007**

No.	Jenis Agama	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Islam	4298	99
2.	Kristen	43	1
3.	Budha	-	-
4.	Hindu	-	-

Sumber: Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Dari tabel 5, dapat terlihat bahwa penduduk Desa Bejagung masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah 4298 orang (99%) dan penduduk yang menganut agama Kristen sejumlah 43 orang (1%).

Selain itu untuk menunjang kegiatan peribadatan, maka tempat peribadatan sangat diperlukan. Oleh karena itu, masyarakat dan Pemerintah bersama-sama membangun tempat ibadah.

Berikut ini tabel yang memuat tentang fasilitas peribadatan yang telah dibangun di Desa Bejagung:

**Tabel 6**  
**Prasarana Ibadah Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Jenis prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Langgar/Mushola	20
3.	Gereja	1
4.	Wihara	-

Sumber: Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Dari tabel 6 terlihat bahwa pada Desa Bejagung prasarana ibadah dapat dikatakan lengkap. Hal itu terbukti bahwa telah adanya 2 (dua) tempat ibadah yang memang sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk Desa Bejagung.

#### d. Keadaan ekonomi

Keadaan perekonomian wilayah Desa bejagung akan ditunjukkan dari sektor mata pencaharian penduduk. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada data jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Pada Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Desa dan Kelurahan	13	0,66
2.	PNS	70	3,55
3.	ABRI	36	1,82
4.	Guru	105	5,32
5.	Dokter	1	0,05
6.	Bidan	1	0,05
7.	Mantri Kesehatan/Perawat	1	0,05
8.	Pensiunan ABRI	10	0,51
9.	Pegawai Swasta	56	2,84
10.	Pegawai BUMN dan BUMD	20	1,01
11.	Pegawai Perbankan	9	0,46
12.	Pertukangan	149	7,56
13.	Sopir	24	1,22
14.	Pedagang	55	2,79
15.	Belum dan Tidak Bekerja	1422	72,11
	Jumlah	1972	100

Sumber : Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung tahun 2007

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Bejagung yang telah memiliki pekerjaan tetap jumlahnya hanya sedikit karena penduduk yang memiliki pekerjaan pasti seperti pegawai, pedagang jumlahnya tidak berimbang dengan penduduk yang memiliki pekerjaan tidak tetap atau bahkan belum bekerja dan tidak bekerja. Apabila hal itu dibandingkan maka jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan tidak tetap jumlahnya lebih besar, atau dengan kata lain persentasenya lebih tinggi daripada penduduk yang pekerjaannya tidak pasti. .

Selain itu, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi desa, Pemerintah Desa Bejagung berusaha untuk menggali dan mengembangkan segala potensi

yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber PAD, sebagai dana penunjang dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri hanya difungsikan sebagai dana pendorong atau sebagai motivasi saja bagi Pemerintah Desa, karena hal tersebut jumlahnya tidak terlalu besar sehingga kurang dapat mencukupi bagi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bejagung.

Untuk lebih jelasnya mengenai keuangan atau pendapatan desa yang ada di Desa Bejagung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Pendapatan Desa Bejagung Tahun Anggaran 2007**

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	Persentase
I.	Sisa Lebih perhitungan tahun lalu :	0	0
II.	Pendapatan Asli Desa : - Hasil Kekayaan Desa - Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - Hasil Gotong-Royong Masyarakat - Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	17.960.000 110.500.000 3.000.000 1.300.000	2,53 15,58 0,42 0,18
III.	Bantuan Pemerintah Kabupaten : - Alokasi Dana Desa (ADD) - Bantuan bagi desa dari retribusi dan pajak daerah - Bantuan Dari APBD - Bantuan Untuk Keperluan Pemerintahan Desa	56.000.000 7.700.000 433.525.000 79.180.000	7,90 1,09 61,13 11,17
	JUMLAH	709.165.000	100

Sumber : Perubahan APBD Desa Bejagung Tahun 2007

Dari tabel 8 terlihat dengan jelas bahwa sumber pendapatan Pemerintah Desa yang terbesar adalah berasal dari bantuan dari Pemerintah Kabupaten dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel diatas. Bantuan dari Pemerintah kabupaten tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan yaitu pengaspalan jalan lingkungan Dusun Bejagung Kidul, sedangkan dana yang berasal dari swadaya masyarakat dan hasil gotong-royong mencapai Rp 113.500.000,00. Karena jumlahnya yang cukup besar, dana swadaya masyarakat tersebut sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Bejagung tahun, karenanya dana atau sumber keuangan desa lainnya kalau

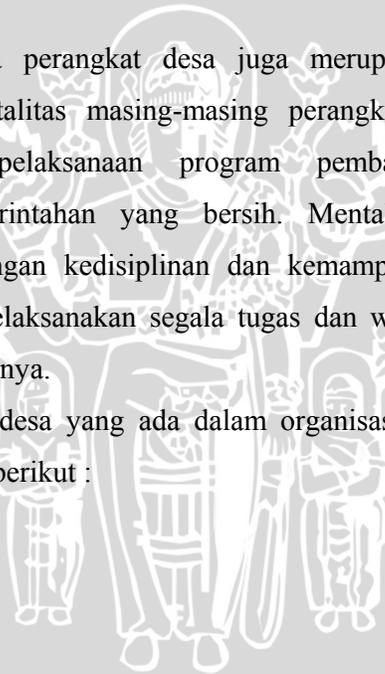
tidak ditunjang oleh swadaya masyarakat sudah barang tentu tidak akan mencukupi. Meskipun dana bantuan Pemerintah Kabupaten sangat besar tetapi bantuan tersebut tidak setiap tahun dengan mudah didapatkan atau bahkan sama sekali tidak dapat. Jadi kedua bantuan tersebut tidak dapat diandalkan.

### 3. Keadaan Aparat Pemerintah Desa

Perangkat Desa yang baik dilihat dari kualitas dan kuantitasnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan aktivitas pemerintahan desa. Oleh karena itu jumlah perangkat desa, kualitas pendidikan dan pengalaman kerja perangkat juga akan sangat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mentalitas daripada perangkat desa juga merupakan salah satu hal terpenting, sebab mentalitas masing-masing perangkat desa akan sangat menentukan dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Mentalitas perangkat desa berkaitan langsung dengan kedisiplinan dan kemampuan perangkat untuk bekerja sama dalam melaksanakan segala tugas dan wewenang yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Susunan perangkat desa yang ada dalam organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 9**  
**Daftar Jabatan Dan Pendidikan Perangkat Desa Bejagung**

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan	Pendidikan
1.	M. Edi Yusanto	Kepala Desa	SLTA
2.	Kusnadi	Sekretaris Desa	SPG
3.	Munandar	Kaur Kesejahteraan Rakyat	SLTP
4.	Sudarno	Kaur Keuangan	SD
5.	Munadi	Kepala Dusun Krajan	SD
6.	Mayanto	Kepala Dusun Besaran	SLTA
7.	Darno	Kepala Dusun Klampok	SLTP
8.	Sri Endah Lestari	Pembantu Kepala Dusun	SLTP
9.	Joyo Kaslik	Pembantu Kepala Dusun	SD
10.	Sumokaslik	Pembantu Kepala Dusun	SD
11.	Sidig	Pembantu Kepala Dusun	SD

Sumber : Buku Data Dasar Profil Desa Bejagung

Pada tabel 9 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian perangkat desa berpendidikan Sekolah Dasar dan sebagian lagi hanya lulusan SLTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparat Pemerintah Desa Bejagung masih tergolong rendah sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

## **B. Data Fokus Penelitian**

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban**

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menemui hambatan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini adalah ikut sertanya anggota masyarakat baik perorangan atau kelompok dalam mengambil bagian pada kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Hal itu seperti yang dikatakan beberapa masyarakat Desa Bejagung mengenai Partisipasi masyarakat. Berikut ini penulis laporkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Bejagung mengenai pandangan mereka tentang partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jiman, salah satu tokoh masyarakat di Desa Bejagung, mengatakan:

“Partisipasi masyarakat intinya keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Keikutsertaan ini diwujudkan dalam bentuk swadaya yang berupa uang ataupun tenaga. Swadaya masyarakat berupa uang itupun diklasifikasi (tinggi, sedang, rendah). Kemudian untuk tenaga berupa ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan kerja bakti pada pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan” (Wawancara di rumah Bapak Jiman, tanggal 22 April 2008 jam 15.00).

Bapak Kanapi, warga masyarakat Dusun Krajan menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat itu pada dasarnya adalah kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, khususnya kegiatan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat ini biasanya diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk uang dan tenaga. Bantuan uang atau tenaga yang diberikan oleh masyarakat tersebut bersifat sukarela tidak memaksa, jadi didasarkan atas kemampuan masing-masing” (Wawancara di rumah Bapak Kanapi, tanggal 22 April 2008 jam 15.00).

Bapak Mustari, warga masyarakat Dusun Klampok menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat bias dikatakan ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Kalau di Desa Bejagung partisipasi masyarakat sebagian besar diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk uang dan dalam bentuk tenaga. Swadaya dalam bentuk uang ini diberikan oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas, sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan lebih memilih partisipasi dalam bentuk tenaga” (Wawancara di rumah Bapak Mustari, tanggal 22 April 2008 jam 15.00).

Dari ketiga pendapat masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat itu adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan partisipasi itu dapat diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu partisipasi dalam bentuk swadaya uang dan partisipasi dalam bentuk swadaya tenaga.

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat di lokasi penelitian disesuaikan dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan kegiatan pembangunan desa, partisipasi masyarakat di Desa Bejagung dapat

dilihat dalam keterlibatan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Partisipasi ini lebih terkoordinasi di wilayah Dusun dan RT/RW. Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bejagung adalah sebagai berikut:

**a) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memegang peranan yang sangat penting, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam hal perencanaan yang akan dibahas disini bukanlah masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi melalui wakil-wakilnya, seperti Ketua RT/RW masing-masing lingkungan warga, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat yang membahas tentang rencana/program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung. Para wakil masyarakat ini akan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya kemudian akan disampaikan di depan forum rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Bejagung, dengan maksud kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung akan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Rapat yang membahas perencanaan pembangunan di Desa Bejagung ini tidak dilakukan tiap bulan, hanya akan dilakukan ketika akan ada kegiatan pembangunan yang perlu untuk dilaksanakan di Desa Bejagung. Sebagaimana yang telah dikatakan Bapak Edi Yusanto selaku kepala Desa Bejagung, yang mengatakan bahwa:

“Rapat untuk membahas tentang kegiatan pembangunan ini tidak dilaksanakan rutin tiap bulan, melainkan jika ada topik, tema tentang rencana kesimpulan dan tindak lanjut tentang pembangunan di Desa Bejagung. Tidak mungkin kita mengadakan rapat kalau tidak ada tema/topik tertentu” (Wawancara di kantor Desa, tanggal 21 April 2008 jam 09.00).

Dalam rapat itu, perwakilan dari masing-masing lingkungan warga akan menyampaikan usul dan aspirasi mereka mengenai pembangunan apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, kemudian dari masing-masing

usul pembangunan tersebut akan dicari prioritasnya, pembangunan apa yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu di Desa Bejagung.

Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam hal perencanaan pembangunan di desanya tidak dilakukan oleh keseluruhan masyarakat melainkan melalui wakil-wakil mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Yusanto selaku Kepala Desa Bejagung, yang mengatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan sangat besar sekali, baik itu pembangunan dari dana swadaya maupun dana pemerintah. Jadi perencanaan pembangunan di Desa Bejagung ini berasal dari bawah yaitu masyarakat, kemudian melalui Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat, usul dari masyarakat tersebut akan dibawa dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa kemudian akan dibuat skala prioritas untuk menentukan pembangunan yang terlebih dahulu dilakukan, jadi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini melalui wakil-wakilnya bukan melalui masyarakat secara keseluruhan” (Wawancara di kantor Desa, tanggal 21 April 2008 jam 09.00).

Untuk mengetahui siapa saja perwakilan masyarakat yang diundang dan yang hadir dalam rapat/musyawarah untuk membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10**  
**Jumlah Wakil Masyarakat Yang Hadir Dalam Rapat Musyawarah**  
**Perencanaan Pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Wakil Masyarakat	Yang Diundang	Yang Hadir	Prosentase (%)
1.	Tokoh Agama	5 orang	3 orang	60
2.	Tokoh Masyarakat	10 orang	9 orang	90
3.	Ketua RT/RW	30 orang	30 orang	100
4.	LPMD	10 orang	10 orang	100
5.	BPD	10 orang	10 orang	100
Jumlah		65 orang	62 orang	95,38

Sumber Data: Arsip kantor Desa Bejagung

Partisipasi masyarakat melalui kehadiran masyarakat dalam pertemuan-pertemuan mengenai kegiatan pembangunan fisik secara keseluruhan berjumlah 62 orang atau 95,38 % dari keseluruhan undangan yang diberikan.

Dalam rapat musyawarah tentang perencanaan pembangunan Desa Bejagung tahun 2007 memutuskan ada 7 (tujuh) kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan diantaranya adalah: (1)

Pengaspalan jalan lingkungan Dusun bejagung Kidul, (2) Pembangunan pendopo makam Sunan Bejagung Kidul, (3) Perbaikan jalan Dusun Ngemplak, (4) Pembangunan jalan poros desa, (5) Perbaikan jalan lingkungan Dusun Krajan, (6) Pembuatan jalan setapak, (7) Pembuatan saluran air. Pembangunan-pembangunan itu dilaksanakan karena didasarkan atas manfaat-manfaat hasil pembangunan tersebut untuk masyarakat dan dirasa paling mendesak untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui hasil dari rapat tentang perencanaan kegiatan pembangunan di Desa Bejagung tahun 2007, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**Hasil Rapat Perencanaan Kegiatan Pembangunan Desa Bejagung**  
**Tahun 2007**

No.	Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan	Sumber Biaya
1	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Bejagung Kidul	Warga Dusun Bejagung Kidul	Kas desa, ADD dan sumbangan dari Pemerintah Kabupaten
2	Pembangunan Pendopo Makam Sunan Bejagung Kidul	Warga Dusun Bejagung kidul	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa
3	Perbaikan Jalan Dusun Ngemplak	Warga Dusun Ngemplak	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa
4	Pembangunan Jalan Poros Desa	Warga Dusun Besar	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa, ADD
5	Perbaikan Jalan Lingkungan Dusun Krajan	Warga Dusun Krajan	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa
6	Pembuatan jalan Setapak	Warga Dusun Bejagung Lor	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa
7	Pembuatan Saluran Air	Warga Dusun Besar	Sumbangan warga (uang dan tenaga), Kas desa

Sumber: Perubahan APBDesa Bejagung tahun 2007 (dimodifikasi oleh penulis)

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung tahun 2007 direncanakan bahwa ada 7 (tujuh)

kegiatan pembangunan, masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut baik dalam bentuk uang ataupun tenaga serta sumber biaya pembangunan yang sebagian besar berasal dari kas desa dan sumbangan warga.

#### **b) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bejagung dibedakan menjadi partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/materai dan dalam bentuk tenaga.

##### **a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/materi**

Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk uang dilakukan apabila pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung masih dalam skala kecil, maksudnya yaitu menggunakan biaya yang tidak besar, sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang berskala besar dengan dengan biaya besar akan dimintakan bantuan dari pemerintah Kabupaten.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ini dapat diwujudkan melalui iuran uang yang dikumpulkan dari dana swadaya masyarakat, namun tidak itu saja. Partisipasi dalam bentuk uang ini juga diberikan oleh masyarakat dalam bentuk sumbangan bahan material, misalkan saja semen. Seperti yang disampaikan oleh seorang informan Bapak Yudha warga Desa Bejagung, yang mengatakan bahwa:

“Sumbangan pembangunan diberikan oleh warga dapat berupa uang melalui iuran ataupun bahan material seperti semen, dan bahan material lainnya. Dan biasanya juga dalam pelaksanaan kerja bakti selalu tersedia makanan dan minuman bagi warga yang bekerja, ini juga adalah sumbangan dari warga sendiri” (Wawancara di rumah Bapak Yudha, tanggal 25 April 2008 jam 15.00).

Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah penting, karena tanpa partisipasi masyarakat pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bejagung tahun 2007, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dari informasi yang diperoleh oleh penulis partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai macam, antara lain:

### 1.1 Partisipasi masyarakat dalam penyediaan material

Bentuk partisipasi dalam penyediaan material ini sangat terlihat dalam pembangunan Pendopo Sunan Bejagung Kidul, pembuatan jalan setapak dan pembuatan saluran air terdiri dari: Semen sebanyak 50 sak, batu bata, dan lain-lain

### 1.2 Partisipasi masyarakat dalam pendanaan

Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk uang untuk 7 (tujuh) kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebesar Rp. 97.250.000. keterangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Uang/Materi**  
**Dalam Pembangunan Desa Pemerintah Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Pembangunan	Swadaya (Rp)	%
1.	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Bejagung Kidul	-	-
2.	Pembangunan Pendopo makam Sunan Bejagung Kidul	56.250.000	84,91
3.	Perbaikan Jalan Dusun Ngeplak	7.250.000	94,77
4.	Pembangunan Jalan Poros Desa	25.000.000	100
5.	Perbaikan Jalan Lingkungan Dusun Krajan	8.750.000	100
6.	Pembuatan jalan Setapak	-	-
7.	Pembuatan Saluran Air	-	-
	Jumlah	97.250.000	

Sumber : Perubahan APBDDesa Bejagung tahun 2007 (dimodifikasi oleh penulis)

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang berhasil dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bejagung jumlah swadaya masyarakat cukup besar. Swadaya masyarakat disini tidak hanya berupa uang/materi saja, melainkan juga berupa bahan bangunan yang dapat dinilai dengan uang.

### b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di desanya tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, dapat dijamin pembangunan desa tidak akan dapat berjalan. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keikutsertaannya

dalam kegiatan pembangunan. Seperti yang terjadi di Desa Bejagung, dimana tingkat partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pembangunan di desanya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada kehadiran dan keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bejagung.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga ini biasanya diwujudkan dalam partisipasi masyarakat dalam pengerjaan kegiatan pembangunan. Bentuk partisipasi ini diberikan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan masyarakat yang belum bekerja. Bagi masyarakat yang belum bekerja diharapkan dengan adanya kegiatan pembangunan ini mereka memiliki pekerjaan untuk sementara dan penghasilan, disisi lain mereka belajar keahlian bidang pertukangan. Jika dinilai dengan uang partisipasi masyarakat ini jumlahnya sebesar Rp. 23.875.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

**Tabel 13**  
**Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga Dalam Pembangunan Fisik Pemerintah Desa Bejagung Tahun 2007**

No.	Kegiatan Pembangunan Fisik	Jumlah			Dinilai Dengan Uang (Rp)
		Tenaga (Orang)	Waktu		
			(Hari)	(Jam)	
1.	Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Bejagung Kidul	20	10	9	5.000.000
2.	Pembangunan Pendopo makam Sunan Bejagung Kidul	10	15	9	3.750.000
3.	Perbaikan Jalan Dusun Ngemplak	15	10	9	3.750.000
4.	Pembangunan Jalan Poros Desa	10	20	9	5.000.000
5.	Perbaikan Jalan Lingkungan Dusun Krajan	15	10	9	3.750.000
6.	Pembuatan jalan Setapak	10	7	9	1.750.000
7.	Pembuatan Saluran Air	7	5	9	875.000
Jumlah		87	77	63	23.875.000

Sumber: Data Arsip kantor Desa Bejagung

Partisipasi tenaga dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Bejagung berjumlah 87 orang dengan waktu pelaksanaan selama 77 hari yang apabila dinilai dengan uang berdasarkan nilai upah kerja perhari untuk setiap

sembilan jam kerja sekitar Rp. 25.000,00, maka partisipasi tenaga dalam pembangunan fisik tersebut bernilai Rp. 23.875.000,00

Menindak lanjuti wawancara berikutnya pada tanggal 20 April 2008, untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dipaparkan oleh Sekretaris Desa Bejagung, Bapak Kusnadi, berpendapat bahwasannya:

“Proyek pembangunan yang dilakukan di Desa Bejagung pada tahun 2007, baik itu yang dananya dari Pemerintah Kabupaten maupun dari swadaya masyarakat maka jumlah tenaga yang dapat dihimpun menunjukkan hasil yang cukup baik, perbandingan jumlah tenaga-tenaga antara program pembangunan yang satu dengan yang lain terlihat bahwa antusias masyarakat lebih cenderung untuk bergotong-royong pada proyek fisik yang sifatnya untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan lingkungan, pembuatan jalan setapak dipandang sebagai kegiatan yang rutin dan harus dilaksanakan secara terus-menerus, pelaksanaan gotong-royong di Desa Bejagung berjalan dengan baik dan kami selaku aparat pemerintahan Desa Bejagung sangat mendukung dan menghimbau serta ikut terjun langsung bersama masyarakat untuk ikut gotong-royong dan masyarakat benar-benar diarahkan yang sifatnya untuk kepentingan umum karena semakin cepat selesai semakin cepat pula bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri” (Wawancara di kantor Desa, tanggal 21 April 2008 jam 09.00).

Petikan wawancara dengan Bapak Kusnadi selaku Sekretaris Desa Bejagung, masyarakat Desa Bejagung sangat antusias sekali dalam proyek pembangunan fisik yang utamanya proyek ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya, hal ini bisa dilihat dalam tabel banyaknya tenaga fisik masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Aparat Pemerintah Desa juga cukup antusias dan membaaur dengan masyarakat dengan ikut serta membantu masyarakat dalam pembangunan dan proyek-proyek tersebut sehingga nantinya diharapkan dalam pelaksanaan gotong-royong ini akan cepat menyelesaikan semua proyek ataupun pembangunan yang nantinya akan cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak Edi Yusanto selaku kepala Desa Bejagung, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pelaksanaan pembangunan di Desa bejagung relative sudah baik. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu hambatan-hambatan itu sudah wajar adanya, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut di kerjakan banyak orang dengan latar balakang yang berbeda-beda sehingga banyak perbedaan “visi dan misi” (persepsi). Didalam pelaksanaan pembangunan tersebut juga terdapat faktor-faktor pendukung yang mana dapat

mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang diantaranya seperti kerjasama masyarakat dalam memberikan bantuan dalam bentuk tenaga dan materi” (Wawancara di kantor Desa, tanggal 21 April 2008 jam 09.30).

Dari petikan wawancara dengan Bapak Edi Yusanto selaku Kepala Desa Bejagung, dalam menjalankan setiap program-program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bejagung tidak semudah yang dibayangkan karena disini banyak terjadi hambatan-hambatan tersebut dari masyarakat itu sendiri yang dimaksud hambatan tersebut adalah dari faktor perbedaan “visi dan misi” (persepsi) masyarakat sehingga sulit sekali bagi aparat desa untuk melakukan suatu penengangan secara cepat, tetapi banyak juga factor pendukung dalam pembangunan di desa Bejagung yaitu banyaknya dukungan dari masyarakat sendiri baik secara materi maupun tenaga.

Bapak Syaiful salah satu tokoh masyarakat di Desa Bejagung, mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Saya senang berada dilingkungan Desa Bejagung karena masyarakatnya baik-baik dan mau bekerjasama untuk kepentingan bersama, biasanya apabila ada kegiatan pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan jalan dll, dana berasal dari swadaya masyarakat dan pihak Pemerintah Desa juga memberikan bantuan meski tidak banyak jumlahnya, yang saya banggakan adalah masyarakat disini tidak pernah perhitungan walaupun sedikit banyak masih ada yang hanya besar omongan saja tetapi tidak banyak membantu”(Wawancara dirumah Bapak Syaiful, tanggal 25 April 2008, jam 15.00 WIB).

Petikan wawancara dengan Bapak Syaiful dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bejagung sangat antusias dalam setiap program pembangunan hal ini bisa dilihat dari tingginya swadaya masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang mempunyai golongan ekonomi keatas secara otomatis akan memberi bantuan untuk pembangunan tersebut dan aparat Desa sudah banyak membantu meskipun tidak banyak dalam pemdanaan.

Dari pengamatan dan informasi yang telah penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam pelaksanaan pembangunan di desanya cukup tinggi, baik itu dalam bentuk swadaya uang maupun dalam bentuk swadaya tenaga. Masyarakat Desa Bejagung tidak hanya bergotong-royong dalam kegiatan pembangunan didesanya tetapi juga mereka sangat mudah jika diminta partisipasinya dalam bentuk sumbangan uang ataupun sumbangan materi lainnya, hal ini dikarenakan tingkat

pendapatan rata-rata masyarakat Desa Bejagung sudah cukup baik, hal ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Bejagung.

### c) Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam pembangunan di desanya tidak hanya sebatas perencanaan, pelaksanaan tetapi mereka juga selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, kegiatan ini penting sekali untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah tercapai dan untuk mengetahui kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, dengan begitu pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan akan mengarah pada kesempurnaan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bejagung, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, pembangunan mana yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu dan pembangunan yang lain akan menyusul pelaksanaannya di tahun berikutnya. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui kegiatan pembangunan mana yang telah dilaksanakan, yang belum, dan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusnadi selaku Sekretaris Desa Bejagung, yang mengatakan bahwa:

“Dari program yang masuk kedesa, yang menggunakan dana dari pemerintah dan masyarakat, akan dilakukan evaluasi, mana yang sudah dirampungkan skala prosentasinya, misal ada yang 100 % berarti sudah lunas, ada yang 70 % berarti di tahun berikutnya harus diperhatikan, sedangkan yang belum sama sekali dijadikan acuan prioritas untuk tahun berikutnya” (Wawancara di Kantor Desa Bejagung, tanggal 24 April 2008 jam 09.00).

Di tempat dan waktu yang berbeda, seorang informan yaitu Bapak Sudarno selaku kaur Keuangan Desa Bejagung, mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan evaluasi, masyarakat Desa Bejagung setelah melakukan kegiatan kerja bakti selalu mengevaluasi, apakah hasil pekerjaan sudah baik apa belum, jika belum akan diperbaiki dan disempurnakan saat itu juga /lewat masyarakat terlebih dahulu”(Wawancara di Kantor Desa Bejagung, tanggal 24 April 2008 jam 09.00).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan evaluasi pembangunan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan diperoleh keterangan bahwa sebagian

besar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terselesaikan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

**Tabel 14**  
**Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Bejagung Tahun 2007**

No	Kegiatan Pembangunan	Keterangan	Manfaat	Dampak
1.	Pembangunan jalan, Pengaspalan jalan serta pembuatan jalan di 4 Dusun, yaitu Dusun Bejagung Kidul, Ngeplak, Krajan, dan Besaran	Pembangunan telah selesai 100%, sesuai dengan yang direncanakan	Memperlancar arus lalu lintas dusun Bejagung Kidul menuju kearah Kabupaten	Masyarakat lebih mudah mengakses dan memperoleh informasi dari luar
2.	Pembangunan Pendopo Makam Sunan Bejagung Kidul	Pembangunan telah selesai 100%, sesuai dengan yang direncanakan	Keadaan sekitar makam lebih baik, dan lebih terawat	Lebih banyak peziarah yang datang dari luar daerah dan pendopo tersebut lebih banyak menampung orang
3.	Pembuatan Saluran air di Dusun Besaran	Pembangunan telah selesai 100%, sesuai dengan yang direncanakan	Memudahkan masyarakat membuang air	Memperlancar arus air untuk menuju saluran akhir

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bejagung tahun 2007 telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Bejagung.

## 2. Kendala-kendala Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

### a) Kepemimpinan

Tingkat kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Faktor kepemimpinan disini menjadi suatu wadah bagi warga masyarakat, apabila pemimpin cakap dalam mempengaruhi warganyadalam rangka pembangunan desa, maka bukan tidak mungkin pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Apabila pemimpin tidak dapat ditempatkan sebagai pemimpin, maka unsur dibawahnya juga tidak akan melaksanakan perintah dari pimpinannya. Oleh karena itu model kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan kepada bawahan atau kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Dimaksud pemimpin disini adalah Kepala Desa.

Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin warga masyarakatnya akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Adapun beberapa model yang dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin akan berbeda satu sama lainnya. Model kepemimpinan tersebut antara lain: model militeristis, model otokratis, model kharismatik, model paternalistis dan model demokratis.

Kepala Desa Bejagung dalam memimpin masyarakatnya agar berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah lebih condong menggunakan model kepemimpinan demokratis, hal ini dapat dilihat bahwa kepala Desa Bejagung tidak hanya sekedar memberikan perintah kepada warga masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan saja, tetapi juga selalu memberikan kesempatan kepada warga masyarakatnya untuk memberikan saran, pendapat, atau bahkan kritik-kritik dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desanya. Kepala Desa selalu mendengarkan aspirasi melalui sebuah rapat atau musyawarah desa. Jadi Kepala Desa tidak hanya memberikan program-program yang sudah dalam bentuk jadi untuk dilaksanakan masyarakat, tetapi Kepala Desa selalu mendahuluinya dengan musyawarah untuk membicarakannya dengan para wakil masyarakat kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung. Dengan begitu pembangunan yang akan dilaksanakan lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat setempat.

b) Motivasi

Tingkat berhasil atau tidaknya kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa juga tergantung dari motivasi yang dimiliki oleh masyarakat yang ada, karena disana masyarakat adalah sebagai subyek yang merencanakan pembangunan dan desa sebagai obyek dari pelaksanaan pembangunan, apabila masyarakat kurang berperan dan kurang termotivasi dalam pelaksanaan pembangunan desam maka sedikit banyak hal ini akan berpengaruh terhadap maju mundurnya pelaksanaan pembangunan nantinya.

Tinggi rendahnya tingkat motivasi disini bisa dilakukan melalui tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus desa. Sosialisasi ini biasanya dilakukan secara formal dan non formal, kalau formal dilakukan melalui musyawarah desa, dan non formal melalui antar warga dalam kegiatan kesehariannya. Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi ini juga dipengaruhi karena adanya tingkat kesadaran bahwa pembangunan ini merupakan kepentingan warga itu sendiri sehingga warga masyarakat termotivasi untuk membangun demi memenuhi kebutuhan mereka juga.

c) Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Tanpa adanya komunikasi yang baik dari Kepala Desa kepada masyarakatnya maka seringkali dalam pelaksanaan pembangunan akan ada hambatan, karena komunikasi menjalin hubungan yang baik dan erat antara Kepala Desa dengan masyarakatnya.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desanya dan ujung tombak keberhasilan pembangunan di desanya, harus mampu memahami dan menyampaikan berbagai informasi dan program pembangunan dalam rangka mempengaruhi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di desanya.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejagung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di

desanya, dirasa masih kurang, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa hanya dilaksanakan ketika ada rapat pertemuan di kantor desa otupun tidak rutin dilakukan setiap bulan, dan juga melakukan kunjungan ke wilayah RT/RW. Kepala Desa Bejagung kurang melakukan interaksi langsung dengan masyarakatnya, padahal pelaksana dari pembangunan itu sendiri adalah masyarakat secara keseluruhan. Hendaknya kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejagung dapat dilakukan langsung kepada masyarakat sehingga dorongan dan motivasi yang dilakukan dapat lebih menyentuh ke masyarakat, oleh karena itu masyarakat akan lebih termotivasi dan terdorong untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya.

Komunikasi langsung antara Kepala Desa Bejagung dan masyarakatnya dalam hal yang lainpun juga jarang dilakukan, hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakatnya kurang dekat. Hal ini seperti informasi dari beberapa informan yaitu beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat desa, yang kesimpulannya mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan masyarakatnya masih kurang, hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakatnya masih kurang dekat sehingga Kepala Desa Bejagung kurang begitu mengenal karakter masyarakatnya.

Apabila seorang Kepala Desa kurang begitu mengenal masyarakatnya, maka Kepala Desa itu akan kurang mengetahui kepentingan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dalam hal ini kaitannya dengan pembangunan. Oleh karena itu diharapkan Kepala Desa Bejagung ke depannya, mampu melakukan kegiatan komunikasi yang baik, baik itu dengan wakil masyarakat maupun dengan masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban**

Dilihat dari pembangunan yang sedang berjalan saat ini, pada dasarnya melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah partisipasi yang datang dari kesadaran dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam

karya ilmiah ini, penulis menyajikan data tentang partisipasi masyarakat dilihat dari bentuk partisipasi yang pada prinsipnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Ada 3 (tiga) bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai dengan penyajian data diatas, yaitu:

**a) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

Pada data fokus sebelumnya, telah dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bejagung pada kegiatan perencanaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan program pembangunan, tidak dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan namun melalui para wakil masyarakat, diantaranya yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT/RW, LPMD, BPD. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui perwakilannya ini diwujudkan dalam sebuah musyawarah yang membicarakan dan membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung, dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan, maka akan membantu mewakili masyarakat. Dengan disampaikannya ide maupun aspirasi mereka maka masyarakat akan merasa ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan nyata pembangunan di desanya, dengan begitu mereka akan merasa berkepentingan dengan pembangunan tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam hal perencanaan pembangunan di desa melalui perwakilannya ini sudah cukup tinggi, ini ditunjukkan pada tabel 10 yang menunjukkan jumlah wakil masyarakat yang hadir dalam rapat atau musyawarah untuk membahas rencana pembangunan di Desa Bejagung, prosentase jumlah tokoh masyarakat yang hadir dengan tokoh masyarakat yang diundang, rata-rata diatas 50%. Dengan prosentase ini, membuktikan bahwa aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para wakil mereka dalam forum rapat atau musyawarah perencanaan tersebut sudah cukup terwakili, karena ide, saran, dan pemikiran mereka ditampung oleh para tokoh masyarakat akan diajukan dan diusulkan dalam rapat tersebut.

Namun hendaknya Kepala Desa Bejagung sebagai penanggung jawab pembangunan di desanya, juga melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakatnya, misalkan saja dengan diadakannya

musyawarah secara besar-besaran yang mengundang seluruh elemen masyarakat. Dengan diadakannya musyawarah tersebut, maka usul dan pendapat dari hasil pemikiran masyarakat akan lebih menyentuh kepentingan mereka. Meskipun telah terwakili oleh para wakil mereka, namun akan lebih baiknya jika Kepala Desa juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, dengan begitu akan lebih mengenal dan mengerti kepentingan masyarakatnya.

Dari semua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kegiatan perencanaan merupakan kegiatan yang penting di dalam memulai suatu kegiatan atau merupakan tahap awal kegiatan, karena perencanaan yang matang biasanya akan memperoleh hasil yang baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu hendaknya kegiatan perencanaan terhadap pembangunan desa dapat disusun dan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan hal tersebut mulai diterapkan di Desa Bejagung.

#### **b) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

##### **1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya uang/materi**

Berdasarkan informasi dari para informan dan juga data yang penulis sajikan pada data fokus terdahulu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Bejagung terhadap pembangunan desa yang berupa swadaya uang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini seperti informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari beberapa informan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Bejagung tidak akan merasa keberatan jika diminta sumbangannya dalam bentuk uang/materi yang lain demi suksesnya pembangunan di desa, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang merasa kesulitan karena keadaan ekonominya yang kurang, namun hal itu tidak sampai menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Desa Bejagung, karena seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat Bejagung rata-rata sudah baik, sehingga tingkat partisipasinya dalam bentuk swadaya uang cukup tinggi. Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam bentuk ini, bisa juga berupa bahan materi yang lain, misalkan saja sumbangan bahan material seperti semen, kapur, paku dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk uang terlihat dalam tabel 12 bahwa

tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk uang cukup tinggi, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ini sebesar Rp. 97.250.000.

## 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga

Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam bentuk swadaya tenaga berdasarkan pada penjelasan data fokus sebelumnya, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ini diwujudkan dengan cara hadir dan ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berupa kegiatan kerja bakti dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pada tabel 13 yang ada di data fokus, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bejagung sudah cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan prosentase anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan lebih dari 50% dan swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga cukup tinggi yang jika dinilai dengan uang berjumlah Rp.23.875.000. Dari penjelasan tersebut, diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan di desanya, karena bagaimanapun pembangunan tersebut adalah untuk masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan jenis-jenis partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Keith Davis sebagaimana yang dikutip oleh (Sastropetro, 1988, h.16) yang mengelompokkan partisipasi menjadi 6 (enam) yaitu partisipasi yang berupa pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam bentuk swadaya uang maupun bentuk swadaya tenaga, keduanya cukup tinggi, yang mana partisipasi dalam bentuk swadaya tenaga ikut didukung dengan semangat gotong-royong yang dimiliki oleh masyarakatnya, sedangkan untuk partisipasi dalam bentuk swadaya uang didukung dengan tingkat pendapatan masyarakat yang cukup baik.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bejagung benar-benar sudah memahami akan pentingnya pembangunan untuk desanya serta besarnya manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan untuk masyarakat sendiri.. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka untuk menuju suatu pembaharuan kearah yang lebih baik diharapkan partisipasi masyarakat Desa Bejagung terhadap pembangunan di desanya harus tetap dipertahankan.

### c). Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejagung sebagai bentuk partisipasinya dalam pembangunan di desa, diwujudkan dengan, melaksanakan kerja bakti untuk perbaikan fasilitas desa ataupun hasil pembangunan yang hasilnya kurang baik atau kurang optimal, sehingga perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan. Kegiatan evaluasi di Desa Bejagung juga digunakan untuk mengetahui kegiatan pembangunan mana yang telah berhasil dilaksanakan dari beberapa prioritas pembangunan yang perlu untuk dilakukan di Desa Bejagung.

Berdasarkan pada data fokus, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejagung dalam bentuk kerja bakti untuk perbaikan hasil pembangunan, dilakukan oleh masyarakat desa secara keseluruhan, inisiatif dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sedangkan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat. Para wakil masyarakat tersebut akan mengadakan rapat/musyawarah evaluasi terhadap pembangunan-pembangunan apa saja yang telah berhasil dilaksanakan di Desa Bejagung.

Partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam kaitannya dengan kegiatan evaluasi terhadap pembangunan di desanya sudah dilakukan oleh masyarakat desa dengan cukup baik. Mereka sudah sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut menjaga dan mengembangkan setiap pembangunan yang ada di desanya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam pembangunan desa dapat diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Ndraha, 1982, h. 27), yaitu bahwa jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya adalah:

- f. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
- g. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- h. Partisipasi dalam mengevaluasi/menilai pembangunan

## 2. Kendala yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

### a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga mereka akan mengikuti apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan intruksi yang diberikan oleh pemimpinannya, pemimpin formal yang ada di desa adalah Kepala Desa.

Model kepemimpinan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Sastropetro, 1986, h. 76) yang mengatakan bahwa model kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Karena apabila Kepala Desa menerapkan gaya kepemimpinan otoriter maka masyarakatnya akan merasa tertekan dengan cara Kepala Desa memimpin. Meskipun masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa, tetapi partisipasi tersebut tidak dilakukan secara sukarela melainkan karena rasa terpaksa.

Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Bejagung adalah gaya kepemimpinan demokratis. Dengan gaya kepemimpinan demokratis seperti itu maka dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selalu didahului dengan rapat/musyawarah dan selalu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk mengeluarkan ide atau pendapat mereka. Disamping itu juga, Kepala Desa Bejagung sangat komunikatif dengan masyarakatnya sehingga masyarakat lebih mengenal pemimpinnya dan hal itu sangat mendukung dalam melakukan koordinasi untuk pembangunan desa. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Kepala Desa Bejagung telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya.

Hendaknya rapat atau musyawarah ini dapat dilakukan rutin setiap bulan, dengan begitu wakil masyarakat akan dapat menyampaikan setiap ide dan pemikiran dari masyarakat yang diwakilinya sehingga Kepala Desa akan lebih mengerti kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa Bejagung dengan masyarakatnya dirasa masih kurang intens. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa

akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung. Dengan begitu setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bejagung akan lebih menyentuh kepentingan masyarakat Bejagung secara keseluruhan.

b) Motivasi

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangat diperlukan, karena apabila masyarakat tidak termotivasi maka pembangunan tidak dapat berjalan karena masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan. Motivasi masyarakat tersebut dapat diperoleh dari antra sesama warga, Kepala Desa ataupun pengurus desa. Kepala Desa sebagai motivator harus dapat mempengaruhi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa pentingnya pembangunan desa itu.

Pemberian penjelasan ini sangat penting guna menumbuhkan motivasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena pada pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya manusia sebagai subyek yang menentukan keberhasilan pembangunan.

c) Komunikasi

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan/berita antara dua orang/lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Sesuai apa yang dijelaskan pada data fokus, diketahui bahwa kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Bejagung dengan masyarakatnya masih dirasa kurang intens. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejagung kaitannya dengan pembangunan, dilakukan pada saat musyawarah dengan para wakil masyarakat di kantor desa yang pelaksanaannya tidak rutin tiap bulan, sehingga mengakibatkan komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat menjadi kurang, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan pembangunan. Dan hal ini akan mengakibatkan pesan-pesan pembangunan tidak akan sampai pada masyarakat sehingga masyarakat tidak tergugah untuk ikut berpartisipasi di seluruh kegiatan pembangunan yang tengah/akan berlangsung.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Bejagung, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

- 1) Partisipasi masyarakat Desa Bejagung sangat besar dalam pembangunan desa, baik dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan evaluasi pembangunan desa. Hal ini terlihat dari keikutsertaan seluruh elemen masyarakat desa dalam perumusan kegiatan pembangunan desa, antara lain Ketua RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam mengikuti musyawarah kegiatan pembangunan, masyarakat berperan aktif dalam memberikan aspirasi mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu: Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang dan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Kontribusi yang paling besar dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bejagung tahun 2007 adalah partisipasi dalam bentuk uang yang kemudian didukung oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga.
- 3) Besarnya partisipasi masyarakat Desa Bejagung dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2007 dilatarbelakangi oleh manfaat-manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Dimana pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bejagung tahun 2007 berdampak positif bagi masyarakat setempat.
- 4) Mengenai kendala yang dihadapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan datang dari perangkat desa, pengurus pembangunan dan antar warga itu sendiri, sedangkan dari model kepemimpinan dalam hal ini yang dimaksud Kepala Desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat masih

tergantung dari bagaimana Kepala Desa dapat menempatkan diri pada masyarakat, dan komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan masyarakat dirasa kurang intens, dan hal tersebut mengakibatkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena mereka kurang mengerti tentang maksud dari pembangunan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran berikut yang dapat dijadikan alternatif untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih baik. Adapun saran tersebut antara lain:

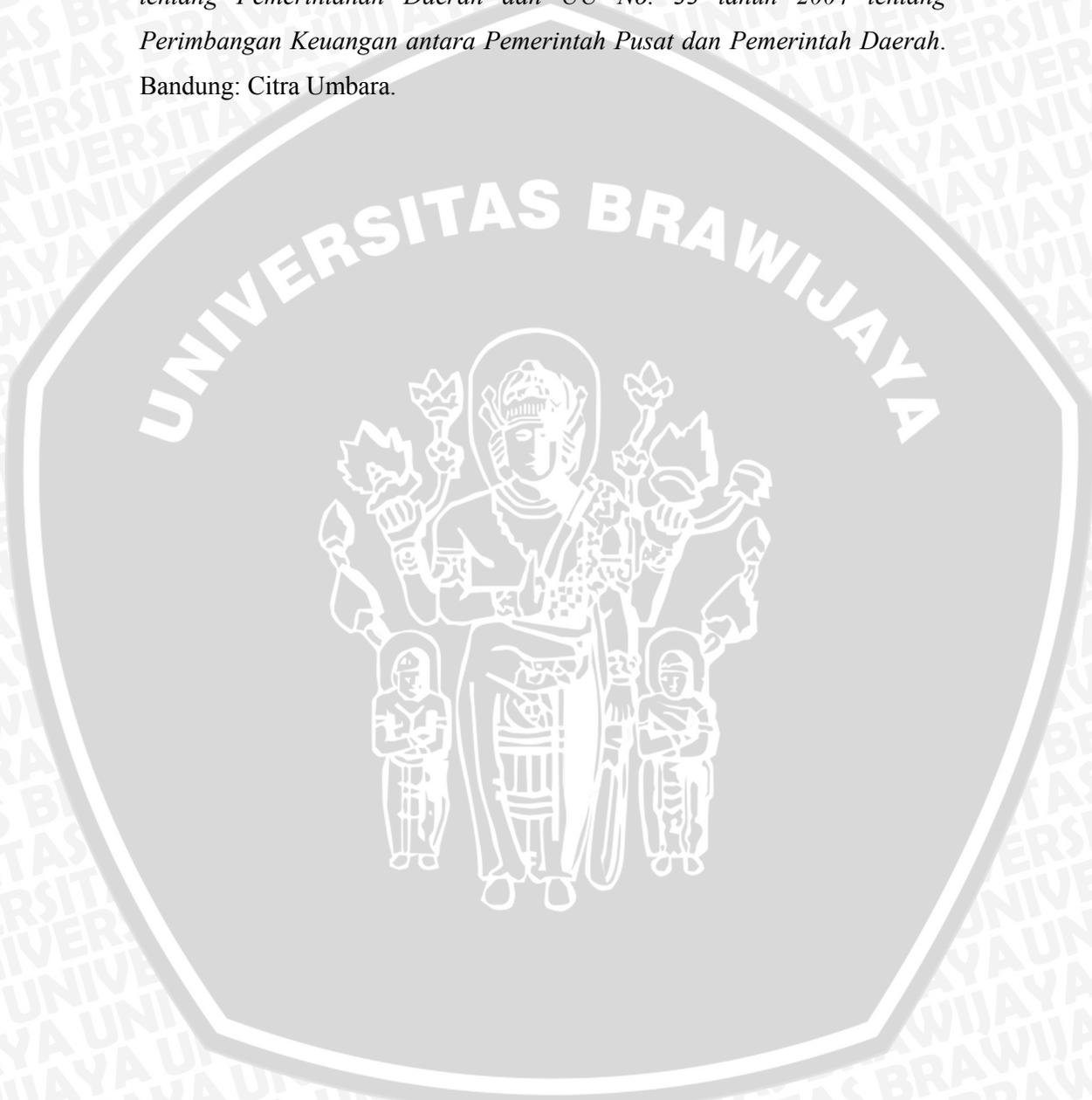
- 1) Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa hendaknya mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati diantara perangkat desa, para wakil masyarakat dan juga masyarakat desa, serta hendaknya mampu menyampaikan informasi dari setiap program pembangunan kepada masyarakat dengan jelas, karena mereka merupakan unsur penting untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan, sehingga akan memberikan kesan yang baik dari masyarakat maupun oleh unsur pemerintahannya, dalam hal ini khususnya untuk Kepala Desa Bejagung.
- 2) Dukungan dari tokoh masyarakat ataupun dari masyarakat yang telah ada ini perlu dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan lagi, karena dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat ini diharapkan pelaksanaan program pembangunan desa akan lebih mendapat dukungan dari masyarakat, mengingat pengaruhnya yang besar dan turut mewarnai kehidupan warga Desa Bejagung.
- 3) Sebaiknya masyarakat desa setempat menyadari akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang nantinya hasil pembangunan tersebut juga untuk mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* edisi revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro, et all. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi daerah di Negara republic Indonesia (Identifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, Christine. S. T. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Mathew dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyarto. 1987. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Pembangunan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Darma.
- PMD Depdagri, Dirjen. 1996. *Modul Pelatihan: Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya..
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indo.
- Sastropoetro, RA, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi.
- . 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Widjaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

-----, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

*Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bandung: Citra Umbara.





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN SEMANDING

DESA BEJAGUNG

Jln.Hayam Wuruk No.87.Telp.0356.331874

**SURAT KETERANGAN**

Nomor.100/ 208/414.202.17/V /2008

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Bejagung,Kecamatan Semanding,Kabupaten Tuban,menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

**N a m a** : WAHYU NUR KHOMSYAH  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Tempat tgl lahir** : Tuban, 7 September 1985  
**A g a m a** : Islam  
**Status perkawinan** : Belum kawin  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi  
**A l a m a t** : JLMF. Haryono. 40 Malang

**Keterangan** : Bahwa orang tersebut diatas saat dikeluarkan surat keterangan ini benar-benar telah menyelesaikan penelitian Skripsi di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 17-04-2008 sampai dengan 17 Mei 2008 dengan judul Penelitian Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Desa ( Studi Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Desa Bejagung,Kecamatan Semanding,Kab.Tuban )

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bejagung, 27 Mei 2008

Kepala Desa Bejagung

**MUKHAMAD EDI YUSANTO**

# PETA DESA BEJAGUNG KECAMATAN SEMANDING.KABUPATEN TUBAN



### KETERANGAN GAMBAR

-  = Jalan Dusun Krajan Jurusan Makam
-  = Jalan Dusun Ngemplak ( Jln.Mbomboko )
-  = Jalan Dusun Krajan ( Jln.Watu Gajah )

### BATAS DESA

- Sebelah Utara = Desa gedongombo
- Sebelah Timur = Desa Gedongombo
- Sebelah Selatan = Desa Semanding
- Sebelah barat = Desa Karang

MENGETAHUI  
KEPALA DESA BEJAGUNG

MUKHAMAD EDI YUSANTO

1. Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Bejagung Kidul



2. Pembangunan Pendopo Makam Sunan Bejagung Kidul



3. Perbaikan Jalan Dusun Ngeplak



4. Pembangunan Jalan Poros Desa



5. Perbaikan Jalan Lingkungan Dusun Krajan



6. Pembuatan Jalan Setapak



7. Pembuatan Saluran Air



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa persepsi/pandangan anda mengenai partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Bejagung?
3. Siapa saja yang terlibat dalam rapat desa untuk merencanakan kegiatan pembangunan di Desa Bejagung?
4. Apakah rapat untuk membahas tentang kegiatan pembangunan ini dilakukan tiap bulan?
5. Bentuk-bentuk partisipasi apa saja yang dilakukan di Desa Bejagung?
6. kegiatan pembangunan apa saja yang dilaksanakan di Desa bejagung tahun 2007 sesuai dengan hasil rapat desa?
7. Darimana sumber dana untuk kegiatan pembangunan diperoleh?
8. Apa yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa?
9. Seberapa besar partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejagung dalam pembangunan desa?
10. Bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Bejagung?
11. Bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan pembangunan desa di Desa Bejagung?
12. Apa saja yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bejagung?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Wahyu Nur Khomsyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 0410313122  
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 7 September 1985  
Pendidikan : 1. SDN Kebonsari II Tuban Tamat tahun 1998  
2. SMP Negeri I Tuban Tamat tahun 2001  
3. SMA Negeri I Tuban Tamat tahun 2004  
Pekerjaan : -

